



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dibidang pembangunan, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun tehitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD periode Pertama (2005-2009) untuk tahun pertama dan tahun kedua telah dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan Program Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan oleh Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 April 2007

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 - 2025

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian otonomi luas kepada Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan harapan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi daerah.

Dalam rangka mencapai arah dan harapan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan dapat dilaksanakan secara bertahap.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan meliputi : Rencana Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ...1..

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Landasan Penyusunan	2
	D. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
	E. Sistematika Penulisan	3
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH	5
	A. Kondisi Umum Daerah	5
	B. Prediksi dan Analisis Kondisi Daerah	39
	C. Analisis Lingkungan Strategis Daerah	60
BAB III	VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH	64
	A. Visi	64
	B. Misi	66
	C. Arah Pembangunan Daerah	67
BAB IV	TAHAPAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH	81
BAB V	PENUTUP	93

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setiap Pemerintah Daerah juga memiliki tugas yang sama untuk mencapai tujuan bernegara melalui pelaksanaan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, tugas pokok setiap bangsa adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tersebut berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tangggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan ditujukan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah dalam seluruh rangkaian kegiatannya disusun dengan menggunakan pendekatan: 1) proses politik, 2) proses teknokratik, 3) proses partisipatif, 4) proses atas-bawah (*top-down*), dan 5) bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menyadari sangat pentingnya eksistensi dan kemanfaatan perencanaan pembangunan tersebut, khususnya dokumen perencanaan berdimensi jangka panjang (RPJPD), yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan yang lebih operasional (RPJMD dan RKPD), maka Pemerintah Kabupaten Jepara perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 adalah :

1. Memberikan arah pedoman yang bersifat makro filosofis yang komprehensif (menyeluruh) bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kabupaten Jepara selama tahun 2005-2025.
2. Memberikan motivasi dan semangat bagi segenap *stakeholders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 disusun dengan tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan kondisi umum dan prediksi daerah Kabupaten Jepara,
2. Menganalisis lingkungan strategis Kabupaten Jepara,
3. Merumuskan visi dan misi daerah Kabupaten Jepara,
4. Merumuskan arah pembangunan daerah Kabupaten Jepara.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten) harus berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan yang ada di Provinsi dan Pusat; sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, terkait, terintegrasi dan sinkron dengan perencanaan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu juga terkait dengan tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang akan diacu dan dipedomani dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 20 tahun yang akan datang.

Secara operasional, dari sisi perencanaan, dokumen RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 ini akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Penyusunan
 - D. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - E. Sistematika Penulisan

- BAB II KONDISI UMUM DAERAH**
 - A. Kondisi Umum Daerah**
 - 1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2. Demografi
 - 3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 4. Sosial Budaya dan Politik
 - 5. Prasarana dan Sarana
 - 6. Pemerintahan
 - B. Prediksi dan Analisis Kondisi Daerah**
 - C. Analisis Lingkungan Strategis Daerah**
 - 1. Faktor Internal dan Eksternal
 - 2. Isu Strategis Daerah

- BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**
 - A. Visi**
 - B. Misi**
 - C. Arah Pembangunan Daerah**

- BAB IV TAHAPAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH**

- BAB V PENUTUP**

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

A. KONDISI UMUM DAERAH

1. GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Letak Geografis. Kabupaten Jepara terletak di posisi $110^{\circ} 9' 48,02''$ sampai $110^{\circ} 58' 37,40''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 43' 20,67''$ sampai $6^{\circ} 47' 25,83''$ Lintang Selatan. Kabupaten Jepara di sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Luas wilayah Kabupaten Jepara $1.004,132 \text{ Km}^2$, wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan ($24,179 \text{ Km}^2$), sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling ($231,758 \text{ km}^2$). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar $740,052 \text{ Km}^2$ (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar $264,080 \text{ Km}^2$ (26,30%). (Tabel II.1.)

Tabel II.1.
Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Jepara
Tahun 2005

No	Kecamatan	Luas (Km^2)
1.	Kedung	43,063
2.	Pecangaan	35,399
3.	Kalinyamatan	24,179
4.	Welahan	27,642
5.	Mayong	65,043
6.	Nalumsari	56,965
7.	Batealit	88,879
8.	Tahunan	38,906
9.	Jepara	24,667
10.	Mlonggo	102,955
11.	Bangsri	85,352
12.	Kembang	108,124
13.	Keling	231,758
14.	Karimunjawa	71,200
	Jumlah	1.004,132

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2005

Ketinggian permukaan tanah wilayah Kabupaten Jepara berada diantara 0 sampai 1.301 mdpl. Daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 sampai 2 mdpl yang merupakan Dataran Pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0 sampai 1.301 mdpl merupakan Perbukitan Lereng Gunung Muria. (Tabel II.2.)

Tabel II.2.
Ketinggian Permukaan Tanah Kecamatan Kabupaten Jepara
Tahun 2005

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)
1.	Kedung	0 - 2
2.	Pecangaan	2 - 17
3.	Kalinyamatan	2 - 29
4.	Welahan	2 - 7
5.	Mayong	13 - 438
6.	Nalumsari	13 - 736
7.	Batealit	68 - 378
8.	Tahunan	0 - 46
9.	Jepara	0 - 50
10.	Mlonggo	0 - 300
11.	Bangsri	0 - 594
12.	Kembang	0 - 1.000
13.	Keling	0 - 1.301
14.	Karimunjawa	0 - 100

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2005

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup dalam waktu satu dasa warsa terakhir cenderung mengalami penurunan kualitas, hal ini ditandai dengan bertambahnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran lingkungan, dan berkurangnya hutan produktif serta terjadinya bencana alam. Salah satu indikator kualitas lingkungan hidup ditunjukkan dari luasnya lokasi lahan kritis. Berdasarkan data diketahui bahwa luas lahan kritis semakin meningkat, tahun 2003 seluas 37.046,66 Ha menjadi 47.183 Ha pada tahun 2004; atau mengalami peningkatan sebesar 27,36%.

Kondisi hutan secara kuantitas tidak terjadi pengurangan luas lahan, hutan negara dan lahan tanaman kayu-kayuan seluas 190,96 Km², tetapi secara kualitas jauh berkurang dimana pada saat ini hampir sebagian besar hutan dalam kondisi gundul akibat penebangan liar. Akibat kondisi tersebut terjadi peningkatan kejadian bencana alam berupa banjir dan erosi, dimana pada tahun 2000 jumlah banjir terjadi 7 kali dan tahun 2005 meningkat menjadi 18 kali. (Tabel II.3.)

Tabel II.3.
Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Jepara
Tahun 1995, dan 2000 – 2005

Tahun	Frekuensi
1995	7
2000	7
2001	12
2002	15
2003	20
2004	13
2005	18

Sumber: Badan Kesbanglinsos Kabupaten Jepara, 2006

Permasalahan pokok pengembangan lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang konsistennya penegakan hukum.

Tata Ruang dan Pertanahan. Pembangunan kewilayahan Kabupaten Jepara dibagi menjadi 6 (enam) Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Penggunaan lahan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami pergeseran, terutama dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian untuk bangunan dan pekarangan. Apabila pada tahun 1995 luas tanah tegalan 18.733,01 Ha menurun sebesar 421,65 Ha menjadi 18.311,36 Ha pada tahun 2005; kemudian luas tanah sawah berkurang dari 26.487,90 Ha (1995) menjadi 26.408 Ha (2005) atau berkurang seluas 79,9 Ha; sedangkan tanah untuk bangunan dan pekarangan meningkat 113,08 Ha, dari 28.156,30 Ha (1995) menjadi 28.269,382 Ha (2005). (Tabel II.4.)

Tabel II.4.
Luas Penggunaan Lahan
Tahun 1995 dan Tahun 2005
(dalam Ha)

No	Penggunaan Tanah	Tahun	
		1995	2005
1	2	3	4
I	TANAH SAWAH	26.487,897	26.408,004
I.1	Pengairan Tehnis		5.380,935
I.2	Pengairan Setengah Teknis		3.398,250
I.3	Pengairan Sederhana PU		10.388,087
I.4	Pengairan Non PU		2.144,014
I.5	Tadah Hujan		5.096,718
I.6	Pasang Surut		0,000
I.7	Tanah Sawah, Lebak, Polder		0,000
I.8	Tanah Sawah yang sementara tidak diusahakan		0,000
II	TANAH KERING		74.005,185
II.1	Tanah untuk Bangunan dan Halaman	28.156,802	28.269,382
II.2	Tegalan	18.156,802	18.311,364
II.3	Padang Rumput	23,702	15,000
II.4	Rawa tidak ditanami		21,000
II.5	Tambak	1.284,278	1.202,282
II.6	Kolam	0,459	9,545
II.7	Tanah yang tidak diusahakan	249,054	330,700
II.8	Tanah untuk Kayu-Kayuan	3.284,408	1.535,462
II.9	Hutan Negara	15.510,436	17.562,271
II.10	Perkebunan Negara	4.051,085	3.954,288
II.11	Tanah untuk Lainnya	2.632,050	2.793,891
	Jumlah	100.413,189	100.413,189

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 1995, 2005

Kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Apabila pada tahun 2003 sertifikat tanah untuk semua jenis berjumlah 3.254 buah, pada tahun 2005 menjadi 5.482 buah, atau meningkat 68,47%. (Tabel II.5.)

Tabel II.5.
Jumlah Sertifikat Tanah
Tahun 2003 – 2005

No	Tanah yang Bersertifikat	Tahun		
		2003	2004	2005
1.	Hak Milik	3.227	5.923	4.981
2.	Hak Guna Bangunan	14	123	386
3.	Hak Guna Usaha	0	57	96
4.	Hak Pakal	13	48	19
5.	Girik	0	0	0
	Jumlah	3.254	6.151	5.482

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005

Permasalahan umum tata ruang adalah peningkatan perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi non pertanian dan ketidakkonsistenan penggunaan lahan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang, sedangkan masalah pertanahan adalah masih banyaknya petak tanah yang belum bersertifikat.

2. DEMOGRAFI

Kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara tahun 1995 sebanyak 835.007 orang, pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.059.638 orang atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,35% per tahun. Tingginya rata-rata pertambahan penduduk pertahun dipengaruhi oleh tingginya pertambahan penduduk pada tahun 1999 sampai 2000, sebesar 10,26% dan tahun 2002 sampai 2003 sebesar 6,21% yang diakibatkan oleh adanya migrasi penduduk menetap di Jepara akibat krisis moneter yang terjadi. (Tabel II.6.)

Tabel II.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

Tahun	Jumlah Penduduk
1995	835.007
1996	858.549
1997	866.566
1998	871.332
1999	880.627
2000	970.945
2001	976.767
2002	979.025
2003	1.039.827
2004	1.059.638
2005	1.078.837

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 1995 – 2005

Jumlah penduduk pada tahun 1995 sebanyak 835.007 orang, terdiri dari perempuan sebanyak 422.469 orang dan laki-laki sebanyak 412.538 orang atau dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 1,02%, artinya per 100 laki-laki terdapat 102 penduduk perempuan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk sebanyak 1.078.837 orang, terdiri dari perempuan sebanyak 535.527 orang dan laki-laki sebanyak 542.510 orang atau dengan *sex ratio* sebesar 0,99, artinya per 100 laki-laki terdapat 99 penduduk perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan komposisi penduduk menurut jenis kelamin di mana laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan. (Tabel II.7.)

Tabel II.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1995 – 2005

Tahun	Jenis Kelamin	
	Perempuan	Laki-Laki
1995	422.469	412.538
1996	433.972	424.577
1997	438.273	428.282
1998	440.775	430.547
1999	445.233	435.384
2000	486.116	484.838
2001	486.661	490.106
2002	488.546	490.478
2003	516.546	523.281
2004	526.387	533.251
2005	535.527	542.510

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 1995 – 2005

Jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) pada tahun 1995 sebesar 504.908 orang dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 330.099 orang; atau dengan angka *dependency ratio* sebesar 63,37%. Pada tahun 2005 penduduk usia produktif sebesar 712.630 orang dan usia tidak produktif sebesar 365.407 orang; atau dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 51,27%. Menurunnya persentase angka *dependency ratio* dapat diartikan bahwa kualitas penduduk Kabupaten Jepara semakin baik. (Tabel II.8.)

Tabel II.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Menurut Kelompok Umur
Tahun 1995 – 2005

Umur	Tahun										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 4	94.309	96.974	97.876		99.456		92.863	93.074	98.865	100.748	102.496
5 - 9	102.553	105.443	106.428		108.155		95.252	95.468	101.409	103.342	105.137
10 - 14	100.048	102.874	103.830		105.517		97.000	97.220	103.270	105.238	107.065
15 - 19	84.311	86.660	87.497		88.917		103.572	103.810	110.261	112.326	114.313
20 - 24	68.556	70.483	71.144		72.296		92.241	92.458	98.189	100.059	101.798
25 - 29	72.110	74.139	74.834		76.046		89.263	89.471	96.021	96.831	98.513
30 - 34	59.538	61.218	61.788		62.791		77.419	77.599	82.416	83.987	85.444
35 - 39	51.773	53.238	53.733		54.607		74.189	74.362	78.975	80.478	81.876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 - 44	36.917	37.956	38.311		38.932		60.649	60.787	64.570	65.800	66.943
45 - 49	38.601	39.687	40.059		40.707		47.611	47.718	50.691	51.696	52.554
50 - 54	38.319	39.399	39.767		40.413		38.849	38.939	41.356	42.143	42.873
55 - 59	28.291	29.092	28.364		29.842		31.164	31.237	33.175	33.807	34.395
60 - 64	26.489	27.235	27.490		27.935		30.230	30.813	32.719	33.343	33.921
65 - 69	14.325	14.728	14.866		15.107		20.312	20.362	21.616	22.028	22.411
70 - 74	10.133	10.417	10.516		10.686		14.799	14.825	15.740	16.039	16.317
75 +	8.731	8.976	9.063		9.210		10.855	10.882	10.554	11.777	11.981
Jumlah	835.007	858.549	886.566		880.627		976.767	979.025	1039.827	1.059.602	1.078.037

Sumber : Jepara Dalam Angka Tahun 1995 - 2005

Jumlah keluarga Pra Sejahtera pada tahun 1995 sebesar 111.185 KK atau 54,88% dari jumlah penduduk sedangkan tahun 2005 sebesar 102.952 KK atau 37,98% dari jumlah penduduk. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga Pra Sejahtera sebesar 8.233 KK (16,9%), artinya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. (Tabel II.9.)

Tabel II.9.
Jumlah Keluarga Sejahtera Kabupaten Jepara
Tahun 1995 - 2005

Tahap Keluarga Sejahtera	Tahun										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pra Sejahtera	111.185 (54,88)	104.547 (50,69)	91.647 (43,25)	83.502 (39,63)	94.559 (42,67)	95.895 (40,39)	105.640 (42,29)	105.489 (41,15)	105.116 (40,33)	102.582 (38,52)	102.952 (37,98)
Sejahtera I	36.958	36.361	39.626	42.066	40.885	49.541	35.390	36.784	39.111	41.325	44.828
Sejahtera II	27.706	32.157	39.592	42.624	36.348	39.559	30.967	32.554	34.380	36.637	37.296
Sejahtera III	19.052	23.711	29.264	33.335	34.055	35.762	56.681	59.108	59.802	61.856	61.219
Sejahtera III+	7.699	9.460	11.767	14.643	15.737	16.668	21.129	22.431	23.401	23.875	24.761
KK Berumah Tidak layak	7.801						7.763	6.984	6.984	7.095	7.881

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 1995 - 2005

Permasalahan umum di bidang kependudukan adalah pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan masih tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera.

Keluarga Berencana. Pasangan Usia Subur (PUS) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 1996 sebanyak 155.848 PUS sedangkan tahun 2005 sebanyak 198.354 PUS, atau terjadi peningkatan sebesar 27,27%. Kondisi ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah peserta KB Aktif yang cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1996 persentase peserta KB mencapai 79,65% tetapi sebaliknya pada tahun 2005 mengalami penurunan hingga 74,96%. Pada tahun 1995 peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencapai 25,15% dari PUS tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan yang cukup besar karena hanya mencapai 18,42% dari PUS. Hal ini berarti akan meningkatkan potensi fertilitas. (Tabel II.10. dan II.11.). Permasalahan pokok Keluarga Berencana adalah makin menurunnya persentase cakupan peserta KB aktif dan menurunnya pencapaian peserta KB MKJP.

Tabel 2.10.
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Jepara
Tahun 1996 – 2005

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif	
			Jumlah	%
1.	1996	155.848	124.130	79,65
2.	1997	158.238	126.995	80,25
3.	1998	164.022	133.160	81,18
4.	1999	168.912	137.661	81,49
5.	2000	182.414	138.611	75,98
6.	2001	181.846	132.912	73,09
7.	2002	186.193	139.804	75,08
8.	2003	190.963	143.615	75,20
9.	2004	194.101	145.651	75,03
10.	2005	198.354	148.687	74,96

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, K KBD Jepara 2006

Tabel II.11.
Cakupan Peserta Aktif MKJP di Kabupaten Jepara
Tahun 1996 – 2005

No	Tahun	Jumlah Peserta KB Aktif	Peserta Aktif MKJP	
			Jumlah	%
1.	1996	124.130	29.981	24,15
2.	1997	126.995	30.913	24,34
3.	1998	133.160	34.298	25,76
4.	1999	137.661	37.599	27,31
5.	2000	132.611	31.935	24,08
6.	2001	132.912	26.998	20,31
7.	2002	139.804	27.150	19,42
8.	2003	143.615	27.869	19,40
9.	2004	145.651	27.725	19,04
10.	2005	148.687	27.393	18,42

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2005, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, K KBD Jepara 2006

3. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Ekonomi Makro. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 1995 sebesar 7,69%, kemudian pada saat krisis ekonomi (tahun 1998) menurun menjadi 0,03%, walaupun angka pertumbuhan pada tahun 1998 relatif kecil namun masih di atas rata-rata angka pertumbuhan daerah lainnya. Pada 2005 meningkat menjadi 4,23%, kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jepara tetap mengalami pertumbuhan positif. (Tabel II.12.)

Tabel II.12.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
1.	1995	7,69
2.	1996	7,31
3.	1997	4,31
4.	1998	0,03
5.	1999	0,67
6.	2000	4,61
7.	2001	3,65
8.	2002	4,01
9.	2003	3,76
10.	2004	4,00
11.	2005	4,23

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Nilai PDRB Kabupaten Jepara menurut harga konstan (1993) cenderung mengalami peningkatan, tahun 1994 sebesar Rp. 778.995,99 menjadi Rp. 3.411.159 pada tahun 2005; atau mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun sebesar 437,89%. (Tabel II.13.)

Tabel II.13.
Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1993
Serta Perkembangan di Kabupaten Jepara Tahun 1994 – 2005

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)
1994	857.528,65	100,00	778.995,99	100,00
1995	1.014.846,61	118,35	838.929,27	107,69
1996	1.174.024,31	136,91	900.287,56	115,57
1997	1.342.210,04	156,52	939.091,14	120,55
1998	2.023.378,77	235,95	939.352,15	120,58
1999	2.396.146,01	279,42	945.638,81	121,39
2000	2.813.210,31	328,06	2.813.210,31	361,13
2001	3.250.361,67	379,04	2.915.878,17	374,31
2002	3.655.056,45	426,23	3.032.806,33	389,32
2003	4.010.481,69	467,68	3.146.838,58	403,96
2004	4.383.716,47	511,20	3.272.708,72	420,12
2005	5.018.164,13	585,19	3.411.159,47	437,89

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 1998 dan 2005

Dilihat dari kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB harga konstan, pada tahun 1994 didominasi oleh Pertanian (32,26%), diikuti oleh Perdagangan, Hotel dan Restoran (21,75%) dan Industri Pengolahan (21,49%). Komposisi ini mulai berubah pada tahun 1998, dimana Industri Pengolahan menjadi dominan yakni sebesar 30,07%, diikuti Perdagangan, Hotel, Restoran (24,43%), dan Pertanian (21,07%). Kondisi terakhir pada tahun 2005, kontribusi didominasi oleh Industri Pengolahan 27,30%, diikuti Pertanian 24,77% dan Perdagangan, Hotel dan

Restoran 21,95%. Struktur perekonomian Kabupaten Jepara didominasi secara berimbang oleh tiga sektor basis, yaitu sektor Industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. (Tabel II.14.)

Tabel II.14.
Struktur Ekonomi Kabupaten Jepara
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1994 – 2005

No	Lapangan Usaha	Tahun (%)											
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian	32,26	31,06	28,23	26,01	21,07	21,86	24,59	24,73	25,15	25,16	24,74	24,77
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,59	0,62	0,63	0,61	0,57	0,59	0,47	0,47	0,47	0,48	0,50	0,52
3.	Industri Pengolahan	21,49	22,03	23,97	25,05	30,07	28,06	28,92	28,70	28,35	27,25	27,55	27,30
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,35	0,36	0,43	0,47	0,57	0,66	0,53	0,59	0,61	0,60	0,66	0,68
5.	Bangunan	3,74	3,68	3,92	3,92	2,75	3,06	3,00	3,19	3,31	4,02	4,34	4,63
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,75	21,67	22,07	22,17	24,43	23,35	23,11	22,84	22,61	22,27	22,04	21,95
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,72	6,21	6,67	7,21	7,88	8,46	5,71	5,66	5,57	5,53	5,19	5,46
8.	Kéuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,71	5,15	5,31	5,67	4,64	4,92	4,97	5,09	5,22	5,47	5,78	5,84
9.	Jasa-jasa	9,40	8,58	8,77	8,98	8,02	9,04	8,71	8,74	8,70	8,71	8,90	8,84
	Laju Pertumbuhan PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 1998 dan 2005

Pendapatan per kapita berdasarkan PDRB harga konstan selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 1994 sebesar Rp. 944.917,90, pada saat krisis ekonomi tahun 1998 menjadi Rp. 1.081.021,04, dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 3.181.597,65 Kondisi menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli masyarakat. (Tabel II.15.)

Tabel II.15.
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Jepara
Tahun 1994 – 2005 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita
1.	1994	944.917,90
2.	1995	1.009.580,72
3.	1996	1.063.191,96
4.	1997	1.089.993,05
5.	1998	1.081.021,04
6.	1999	987.819,70
7.	2000	2.903.320,67
8.	2001	2.960.964,78
9.	2002	3.025.602,37
10.	2003	3.041.014,32
11.	2004	3.107.041,28
12.	2005	3.181.597,65

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 1998 dan 2005

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh laju inflasi, pada tahun 1995 laju inflasi mencapai 9,46%, pada saat krisis ekonomi tahun 1998 meningkat tajam mencapai 69,2%, karena adanya ketidak stabilan harga-harga barang,

kemudian pada tahun 2004 menurun menjadi sebesar 5,65%. Laju inflasi tersebut ternyata lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi daerah. (Tabel II.16.)

Tabel II.16.
Laju Inflasi Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Tahun	Laju Inflasi
1.	1995	9,46
2.	1996	7,86
3.	1997	13,92
4.	1998	69,20
5.	1999	8,17
6.	2000	
7.	2001	13,75
8.	2002	9,51
9.	2003	5,88
10.	2004	5,65
11.	2005	16,29

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 1995 – 2005

Kondisi investasi di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir, dimana tahun 1995 untuk PMA sebesar Rp. 3.831.382,6 juta untuk PMDN Rp. 55.383 juta; tahun 2005 untuk PMA meningkat menjadi Rp. 8.044.233,4 juta untuk PMDN Rp. 139.574,6 juta. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki daya tarik yang besar bagi investor untuk melakukan penanaman modal. (Tabel II.17.)

Tabel II.17.
Nilai Investasi Kabupaten Jepara
Tahun 1995, dan 2000 – 2005

No	Tahun	Nilai Investasi (000.000)	
		PMA	PMDN
1.	1995	3.831.382,6	55.383
2.	2000	7.943.411,794	60.174,6
3.	2001	7.962.736,419	60.174,6
4.	2002	7.975.815,679	60.174,6
5.	2003	7.999.517,373	60.174,6
6.	2004	8.019.652,873	139.574,6
7.	2005	8.044.233,4	139.574,6

Sumber : Dinas Indagkoppm Kab. Jepara Tahun 2005

Permasalahan pokok dibidang makro ekonomi Kabupaten Jepara adalah walaupun pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita mengalami peningkatan, namun masih relatif kecil sehingga belum dapat menambah lapangan pekerjaan untuk menyerap pengangguran yang masih besar.

Keuangan Daerah. Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber pendapatan daerah yang besar antara lain melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan keuangan daerah pada tahun 1995/1996 sebesar Rp. 23,83 milyar adapun sumbangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4,9 milyar atau sebesar 20,83%, tahun 2000 menjadi Rp. 87,88 milyar dengan sumbangan PAD sebesar 11,34%, tahun 2001 sebesar Rp. 257,5 milyar dengan sumbangan yang berasal dari PAD sebesar Rp. 20,1 milyar atau mencapai 7,8%. Penerimaan pendapatan pada tahun ini (2001) mengalami lonjakan besaran angka yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan komponen gaji PNS dihitung sebagai penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pada tahun 2005, jumlah APBD sebesar Rp. 401,1 milyar dengan PAD sebesar Rp. 50,7 milyar atau sebesar 12,65%. Dengan demikian, rata-rata peningkatan penerimaan APBD selama sepuluh tahun terakhir sebesar 29,26%. Tingginya rata-rata penerimaan pendapatan tersebut sebagai akibat dari besarnya dana perimbangan yang diterima. (Tabel II.18.)

Tabel II.18.
Perkembangan APBD, PAD dan Rasio PAD terhadap APBD
Kabupaten Jepara Tahun 1995 -2005

No	Tahun	Jenis Data		
		APBD	PAD	Prosentase PAD terhadap APBD
1	1995/1996	23.831.145.238	4.962.864.210	20,83
2	1996/1997	32.345.608.046	5.996.357.782	18,5
3	1997/1998	47.159.917.995	9.061.167.792	19,2
4	1998/1999	84.520.987.918	12.715.348.424	15,0
5	1999/2000	108.761.566.437	12.374.290.465	11,4
6	2000	87.866.327.945	9.970.486.166	11,34
7	2001	257.532.589.674	20.099.327.976	7,80
8	2002	290.306.771.335	45.111.747.990	15,54
9	2003	370.344.030.830	53.740.237.824	14,51
10	2004	385.527.376.770	47.266.545.884	12,26
11	2005	401.140.563.519	50.761.966.993	12,65

Sumber : Dipenda Kabupaten Jepara, 2006

Realisasi pengeluaran Kabupaten Jepara pada tahun 1995/1996 sebesar Rp. 21,28 milyar, tahun 2000 sebesar Rp. 87,89 milyar (pengeluaran rutin Rp. 66,12 milyar dan pengeluaran pembangunan Rp. 21,76 milyar), tahun 2001 sebesar Rp. 257,53 milyar (pengeluaran rutin Rp. 166,05 milyar dan pengeluaran pembangunan Rp. 91,49 milyar), dan tahun 2005 sebesar Rp. 401,14 milyar (pengeluaran rutin, terdiri dari: belanja administrasi umum, belanja operasi pemeliharaan, bagi hasil dan bantuan kelangan, dan belanja tak tersangka Rp. 344,49 milyar dan pengeluaran pembangunan, terdiri dari: belanja modal sebesar Rp. 56,65 milyar). Hal ini menunjukkan proporsi belanja daerah sebagian besar masih diperuntukkan bagi alokasi belanja rutin daripada belanja pembangunan. (Tabel II.19.)

Tabel II.19.
Belanja dan Penerimaan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 1995, dan 2000 – 2005

No	Tahun	Belanja (Rp)	Penorimaan (Rp)
1.	1995	21.278.543.001	23.823.013.952
2.	2000	87.886.327.945	89.716.550.210
3.	2001	257.523.589.674	274.244.390.749
4.	2002	290.306.771.335	328.357.330.408
5.	2003	370.334.030.830	359.871.692.704
6.	2004	385.527.376.770	372.049.234.851
7.	2005	401.140.563.519	411.000.175.957

Sumber: Dipenda Kabupaten Jepara Tahun 2006

Permasalahan pokok berkaitan dengan keuangan daerah adalah masih kecilnya rasio kemandirian keuangan daerah yang hanya mencapai rata-rata sebesar 14,5% dari seluruh pendapatan Daerah, dari sisi pengeluaran sebagian besar masih digunakan untuk mencukupi kebutuhan rutin.

Perdagangan. Sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1994 sebesar 21,75% (Rp. 158.149,99 juta), tahun 1998 sebesar 24,43% (Rp. 214.822,12), tahun 2004 sebesar 22,18% (Rp. 238.984,40 juta). Pencapaian nilai ekspor untuk berbagai komoditi, pada tahun 1994 sebesar Rp.158.149.990.000, tahun 2005 meningkat menjadi Rp.687.947.420.000. Ekspor Kabupaten Jepara didominasi oleh 3 (tiga) komoditas unggulan sektor perdagangan, yaitu: mebel (*furniture*), kerajinan kayu (*handycraf*), dan karet. (Tabel II.20.)

Tabel II.20.
Sektor Perdagangan Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)
Tahun 1994 – 2005

No	Tahun	Nilai Sektor Perdagangan
1.	1994	158.149,99
2.	1995	170.274,77
3.	1996	185.800,12
4.	1997	193.659,81
5.	1998	214.822,12
6.	1999	206.257,39
7.	2000	595.450,03
8.	2001	611.121,01
9.	2002	629.223,92
10.	2003	643.489,84
11.	2004	662.310,06
12.	2005	687.947,42

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Permasalahan bidang perdagangan adalah walaupun nilai ekspor mengalami peningkatan, namun peningkatannya masih relatif kecil dan banyak dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jumlah koperasi dan UKM tahun 2004 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) 17 unit, Koperasi Primer Non KUD 471 unit (sampai Oktober 2005 menjadi 489 unit), Pusat Koperasi 3 unit, UKM 6.244 unit. Jumlah anggota KUD 20.165 orang dan anggota Koperasi Non KUD 31.880 orang. Volume usaha KUD tahun 2004 sebesar Rp. 79.015.560 juta sedangkan untuk Koperasi Non KUD sebesar Rp. 50.865.834 juta. Permasalahan koperasi dan UKM adalah rendahnya struktur permodalan, daya inovasi dan kreatifitas serta etos kerja dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi, peluang pasar serta kurangnya kemitraan antar UKM.

Tenaga Kerja. Kabupaten Jepara mempunyai jumlah tenaga kerja dengan etos kerja yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah angkatan kerja, dimana pada tahun 2000 sebanyak 477.955 orang meningkat menjadi 540.555 orang pada tahun 2005. Jumlah penganggur terbuka tahun 2000 sebanyak 33.458 orang dan tahun 2005 meningkat menjadi 37.837 orang. Permasalahan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya lapangan kerja dan masih tingginya jumlah pengangguran. (Tabel II.21.)

Tabel II.21.
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran
Kabupaten Jepara Tahun 2000 – 2005

Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran
2000	477.955	33.458
2001	516.648	36.191
2002	519.806	36.384
2003	529.399	36.918
2004	538.902	37.751
2005	540.555	37.837

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, 2006

Pertanian dan Peternakan. Kontribusi sektor pertanian tanaman bahan makanan dan peternakan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1995 sebesar Rp. 178.209,19 juta, tahun 1998 sebesar Rp. 136.134,93 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp. 565.660,79 juta; kontribusi ini mengalami penurunan, terutama pada tahun 1998, saat krisis ekonomi terjadi, namun tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jenis komoditi potensial tanaman bahan makanan unggulan Kabupaten Jepara yang dapat dikembangkan adalah buah-buahan, padi, sayur-sayuran, kacang tanah, dan ketela pohon. Sedangkan komoditi potensial peternakan yang memiliki nilai produksi cukup besar adalah: ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Dalam pengembangan sektor pertanian dirasakan masih kurang investasi di bidang agro industri. Permasalahan umum pertanian dan peternakan adalah secara ekonomis, peranan sub sektor ini cenderung meningkat walaupun tidak terlalu signifikan (hanya 0,03 persen lebih baik dari tahun 2004, Tabel II.14.), namun sektor ini tetap merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja cukup besar. (Tabel II.22.)

Tabel II.22.
Sektor Tanaman Bahan Makanan dan
Peternakan Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1995 – 2005
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Tanaman Bahan Makanan	Nilai Sektor Peternakan	Jumlah
1995	167.432,45	10.776,74	178.209,19
1996	163.918,52	13.003,77	176.922,29
1997	164.184,54	9.883,95	174.068,49
1998	116.919,11	10.399,85	127.318,96
1999	125.501,37	10.633,56	136.134,93
2000	436.649,24	26.415,04	463.064,28
2001	444.689,80	31.961,18	476.650,98
2002	473.368,92	35.183,97	508.552,89
2003	500.336,39	37.207,39	537.543,78
2004	500.192,43	38.214,56	538.406,99
2005	526.912,33	38.748,46	565.660,79

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Kehutanan dan Perkebunan. Kontribusi sektor kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1995 sebesar Rp. 70.257,38 juta, tahun 1998 sebesar Rp. 62.797,17 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp. 233.847,12 juta; kontribusi ini sempat mengalami penurunan pada tahun 1995 hingga tahun 1999, kemudian mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2005. Jenis komoditi kehutanan yang memiliki nilai produksi terbesar adalah kayu bakar rakyat, bambu, kayu hutan rakyat, dan arang rakyat. Sedangkan untuk perkebunan, komoditi unggulannya adalah kapuk randu, berturut-turut kemudian kelapa, tebu, karet, jambu mete dan coklat. Permasalahan pokok sub sektor kehutanan dan perkebunan adalah khusus untuk sub sektor kehutanan cenderung semakin menurun kontribusinya terhadap PDRB selama 5 tahun. (Tabel II.23.)

Tabel II.23.
Sektor Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 – 2005
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Tanaman Perkebunan	Nilai Sektor Kehutanan	Jumlah
1995	52.000,97	18.256,41	70.257,38
1996	50.625,48	15.188,70	65.814,18
1997	50.287,89	10.454,28	60.742,17
1998	52.538,48	10.258,69	62.797,17
1999	52.760,61	8.757,08	61.517,69
2000	156.640,25	25.854,31	182.494,56
2001	171.989,28	26.839,00	198.828,28
2002	191.156,54	20.629,83	211.786,37
2003	196.425,06	18.251,03	214.676,09
2004	208.875,82	17.410,26	226.286,08
2005	217.334,57	16.512,55	233.847,12

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Perikanan dan Kelautan. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1995 sebesar 1,45% (Rp. 12.141,45 juta), tahun 1998 sebesar 0,83% (Rp. 7.836,76 juta), dan tahun 2005 sebesar 1,32% (Rp. 45.304,12 juta); kontribusi ini mengalami penurunan sejak tahun 1995 hingga tahun 1999, namun kembali naik sejak tahun 2000 sampai 2005. Komoditas unggulan perikanan dan kelautan adalah ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan teri. Permasalahan yang masih dihadapi pada sektor perikanan dan kelautan adalah kondisi fluktuatif dalam grafik kontribusi terhadap PDRB dan nilai produksi dalam lima tahun terakhir, hal ini dapat disebabkan antara lain karena disebabkan oleh *overfishing* dan kerusakan lingkungan laut. (Tabel II.24.)

Tabel II.24.
Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 – 2005
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Perikanan
1995	12.141,45
1996	11.432,06
1997	9.480,16
1998	7.836,76
1999	9.073,83
2000	46.158,87
2001	45.578,42
2002	42.477,92
2003	40.113,07
2004	44.978,40
2005	45.304,12

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Pengairan. Luas sawah yang dialiri dengan irigasi pada tahun 2001 seluas 23.826 Ha, terdiri dari irigasi teknis 8.591 Ha, irigasi setengah teknis 2.140 Ha, dan irigasi sederhana 13.093 Ha; pada tahun 2005 seluas 24.262 Ha, terdiri dari irigasi teknis 8.660 Ha, irigasi setengah teknis 2.853 Ha, dan irigasi sederhana 12.749 Ha. Jumlah bendung selama lima tahun terakhir relatif tetap (646 buah), terdiri dari bendung permanen, bendung bronjong, dan bendung rumpon. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pengairan adalah berkurangnya sumber air pada musim kemarau dan menurunnya fungsi bendung, saluran dan bangunan air lainnya akibat adanya sedimentasi. (Tabel II.25.)

Tabel II.25.
Luas Sawah, Bangunan Air dan Sungai di Kabupaten Jepara
Tahun 2001 – 2005

Jenis Data	TAHUN				
	2001	2002	2003	2004	2005
Luas sawah irigasi :					
1. Irigasi Teknis	8.625	8.628	8.630	8.660	8.660
2. Irigasi ½ teknis	2.391	2.473	2.487	2.853	2.853
3. Irigasi sederhana	12.810	12.725	12.709	12.749	12.749
Bangunan Air :					
1. Bendung					
a. Permanen	260	260	260	260	260
b. Bronjong	114	114	127	137	137
c. Rumpon	272	272	269	259	259
2. Saluran					
a. Primer	8.702	8.702	8.702	8.702	8.702
b. Sekunder	827.090	827.090	827.090	827.090	827.090
3. Bangunan lainnya	480	487	495	495	495
Sungai	38	38	38	38	38

Sumber : Dinas PU, Jepara 2006

Pertambangan dan Energi. Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1995 sebesar 0,62% (Rp. 5.233,33 juta), tahun 1998 sebesar 0,57% (Rp. 5.331,36 juta), dan tahun 2005 sebesar 0,22% (Rp. 17.844,75 juta); kontribusi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kabupaten Jepara memiliki kekayaan bahan tambang dan galian sangat besar, meliputi 20 jenis bahan tambang. Potensi bahan tambang yang sudah dieksploitasi baru 6 (enam) jenis, yaitu: felsdspar, pasir, pasir batu, tanah liat, tanah urug dan pasir besi. (Tabel II.26.)

Tabel II.26.
Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 – 2005
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Pertambangan dan Penggalian
1995	5.233,33
1996	5.654,11
1997	5.699,83
1998	5.331,36
1999	5.595,31
2000	13.171,48
2001	13.692,87
2002	14.190,56
2003	15.247,48
2004	16.507,63
2005	17.844,75

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Kontribusi sub sektor listrik terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1995 sebesar 0,36% (Rp. 2.982,61 juta), tahun 1998 sebesar 0,54% (Rp. 5.048,80 juta), dan tahun 2005 sebesar 0,62% (Rp. 21.149,85 juta); kontribusi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pembangunan energi listrik khususnya yang bersumber dari PLN telah menjangkau 197 desa dan kelurahan di Kabupaten Jepara, sedangkan 3 desa di Kecamatan Karimunjawa telah diatasi dengan listrik tenaga diesel, tenaga bayu dan tenaga surya. (Tabel II.27.)

Tabel II.27.
Sektor Listrik Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)
Tahun 1995 – 2005

Tahun	Nilai Sektor Listrik
1	2
1995	2.982,61
1996	3.578,62
1997	4.137,13
1998	5.048,80

1	2
1999	5.792,43
2000	13.826,08
2001	15.871,61
2002	17.121,17
2003	17.372,89
2004	19.976,48
2005	21.419,85

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Permasalahan pertambangan dan energi adalah adanya penambangan liar yang tidak mengindahkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta masih perlu dikembangkan jangkauan jaringan listrik PLN di kawasan pedukuhan.

Perindustrian. Kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1995 sebesar 21,49% (Rp. 184.836,59 juta), tahun 1998 sebesar 30,07% (Rp. 282.426,03 juta), dan tahun 2005 sebesar 27,30% (Rp. 931.381,96 juta); kontribusi pada krisis ekonomi tahun 1998 mengalami peningkatan yang cukup besar, tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan.

Pada tahun 1997 jumlah usaha industri sebanyak 10.207 unit, tahun 2005 meningkat menjadi 16.244 unit. Kabupaten Jepara memiliki beberapa keunggulan komparatif antara lain jumlah tenaga kerja sektor industri mebel sangat besar, sedangkan keunggulan kompetitifnya antara lain kualitas produk industri yang sudah dikenal di manca negara. Jenis industri yang berkembang dan merupakan komoditi unggulan, antara lain kerajinan mebel, tenun ikat troso, konveksi, keramik/gerabah. (Tabel II.28.)

Tabel II.28.
Sektor Industri Kabupaten Jepara
Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)
Tahun 1995 – 2005

Tahun	Nilai Sektor Industri
1995	184.836,59
1996	215.757,96
1997	235.288,38
1998	282.426,03
1999	265.388,58
2000	813.448,29
2001	836.712,36
2002	859.932,45
2003	873.110,09
2004	901.598,32
2005	931.381,96

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 dan 2005

Permasalahan yang dihadapi sektor industri adalah bahan baku yang semakin berkurang dan bergantung pada daerah lain serta kurangnya penguasaan teknologi modern dan persaingan harga yang ketat.

Transportasi dan Telekomunikasi. Kondisi prasarana jalan tahun 1995, panjang jalan Kabupaten 497,59 km, berdasarkan kondisi jalan, diketahui jalan baik 307,72 km, sedang 142,87, rusak 47,01 km. Pada tahun 2005 panjang jalan menjadi 703,68 Km, berdasarkan kondisi jalan, diketahui jalan baik 623,52 Km, sedang 74,31 Km, dan rusak 5,85 Km. (Tabel II.29.)

Tabel II.29.
Kondisi Jalan Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Kondisi	Tahun										
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Kelas Jalan												
1	Aspal	410,06	410,58	455,27	627,53	642,63	627,53	683,18	675,77	703,68	703,68	703,68
2	Kerikil	45,88	45,88	28,00	10,62	10,61	10,61	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Tanah	41,66	41,66	41,41	65,54	65,54	65,54	13,50	20,91	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	497,59	498,12	524,68	703,68	718,78	703,68	703,68	703,68	703,68	703,68	703,68
Kondisi Jalan												
1	Baik	307,72	307,72	346,91	492,58	507,67	539,08	570,26	574,40	574,40	615,90	623,52
2	Sedang	142,87	142,87	103,82	108,49	108,49	100,26	105,21	101,37	101,37	52,60	74,31
3	Rusak	47,01	47,01	73,96	102,61	102,62	64,34	28,22	27,91	27,91	35,18	5,85
	Jumlah	497,59	497,59	524,68	703,68	718,78	703,68	703,68	703,68	703,68	703,68	703,68

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 1995 – 2005

Kondisi perhubungan laut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pelayaran, yang direpresentasikan pada arus kapal yang berlabuh dan berlayar melalui pelabuhan Jepara dan Karimunjawa. Kondisi fasilitas pelabuhan udara yang ada di Kepulauan Karimunjawa telah mampu melayani penerbangan Semarang-Karimunjawa. Untuk kondisi telekomunikasi cenderung mengalami peningkatan, tampak dari penambahan jumlah Satuan Sambungan Telepon (SST) selama sepuluh tahun terakhir. Jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) sudah menjangkau seluruh Kecamatan, yang dilayani oleh STO Jepara, Pecangaan, Bangsri, Keling dan Karimunjawa.

Permasalahan pokok transportasi dan telekomunikasi adalah masih banyak jalan dalam kondisi belum baik dan penurunan kualitas jalan, terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan laut, udara dan telekomunikasi.

Pariwisata dan Budaya. Kabupaten Jepara memiliki potensi obyek wisata alam yang sangat beragam mulai dari pegunungan sampai pada pantai dan kepulauan. Jumlah objek wisata yang sudah dikembangkan, yaitu 5 objek wisata alam dan 7 objek wisata sejarah. Jumlah kunjungan wisata domestik secara keseluruhan mengalami peningkatan, sebaliknya jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun 1995 sebesar Rp. 202.997.000 dengan jumlah wisatawan 491.277 meningkat menjadi

Rp. 335.159.000 pada tahun 2005 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 831.682. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata mengalami pertumbuhan yang cukup baik karena ditunjang oleh pembangunan infrastruktur. (Tabel II.30.)

Tabel II.30.
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan
Sektor Pariwisata Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

Tahun	Kunjungan Wisatawan	Pendapatan Pariwisata
1995	491.277	202.997.000
1996	517.158	202.394.000
1997	561.469	256.995.000
1998	576.992	276.509.000
1999	373.876	237.912.000
2000	420.838	363.349.000
2001	587.862	461.485.000
2002	599.673	354.628.000
2003	776.446	340.927.000
2004	790.323	394.229.000
2005	831.682	355.159.000

Sumber : Disparta Kabupaten Jepara, 2006

Permasalahan pariwisata adalah obyek wisata belum dikelola secara optimal, karena keterbatasan dana, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Sedangkan permasalahan bidang kesenian yaitu masih banyaknya kesenian-kesenian yang belum dikelola secara profesional, sehingga belum layak untuk dijual.

4. SOSIAL BUDAYA

Kesehatan. Sejak tahun 1996 hingga 2005, indikator utama kesehatan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dari 69,2 tahun (2002) menjadi 70 tahun (2004). Meningkatnya persentase kunjungan ibu hamil (KIH) dari 58,95% pada tahun 1996 menjadi 88,64% pada tahun 2005. Menurunnya angka kematian ibu dari 27 kasus pada tahun 1996 menjadi 17 kasus pada tahun 2005. Namun demikian masalah gizi buruk masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dimana pada tahun 1996 terdapat 78 kejadian gizi buruk dan meningkat tajam menjadi 212 kejadian pada tahun 2005. (Tabel II.31.)

Tabel II.31.
Kondisi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Kabupaten Jepara Tahun 1996 – 2005
(Persen)

No	Indikator Kesga dan Gizi	Tahun									
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Kunjungan ke-4 Bumil	58,95	68,85	58,86	75,3	78,6	80,5	81	88,9	91,1	88,64
2.	Persallnan Nakes	47,29	57,21	51,75	70,6	72,1	79	80,6	87	82,4	84,31
3.	Kematian Ibu	27	22	11	16	15	15	15	20	20	17
4.	Kematian Neonatal	115	117	132	122	94	108	106	100	89	78
5.	Gizi Buruk	78	79	56	80	85	78	94	113	115	212

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, DKK Jepara 2006

Jumlah dokter umum pada tahun 1996 berjumlah 35 orang dan menjadi 51 orang pada tahun 2005, namun dokter spesialis tidak mengalami penambahan. Rasio jumlah dokter dibanding dengan 100.000 penduduk tidak mengalami peningkatan yang berarti, tahun 1996 sebesar 5, tahun 2005 menjadi 5,8. (Tabel II.32. dan Tabel II.33.)

Tabel II.32.
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Jepara
Tahun 1996 – 2005

No	Tenaga Medis	Tahun									
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Dokter Umum	35	37	31	39	37	45	41	40	45	51
2.	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3.	Dokter Spesialis	7	8	9	9	9	9	11	11	11	11
4.	Perawat	195	214	225	232	221	222	242	228	229	229
5.	Bidan	256	149	200	197	208	205	195	191	198	191

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, RSUD Kartini 2006

Tabel II.33.
Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk Kabupaten Jepara
Tahun 1996 – 2005

No	Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk
1.	1996	43	858.549	5
2.	1997	46	866.566	5,3
3.	1998	41	871.332	4,7
4.	1999	49	880.627	5,6
5.	2000	47	970.945	4,8
6.	2001	55	976.767	5,6
7.	2002	55	979.025	5,7
8.	2003	53	1.039.872	5,1
9.	2004	58	1.059.638	5,5
10.	2005	63	1.078.837	5,8

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, K KBD Jepara 2006

Pada tahun 1996 jumlah Puskesmas sebanyak 18, sedangkan pada tahun 2005 mencapai 64 terdiri dari 9 Puskesmas Rawat Inap, 11 Puskesmas Non Rawat Inap, dan 44 Puskesmas Pembantu. Pada tahun 1996 jumlah Rumah Sakit 3 buah, pada tahun 2005 menjadi 6 buah. Rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk menunjukkan peningkatan, tahun 1996 mencapai 1 herbanding 14.309, tahun 2005 menjadi 1 dibanding 16.844. (Tabel II.34. dan Tabel II.35.)

Tabel II.34.
Jumlah Prasarana Fisik Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 1996 – 2005

No	Jenis Prasarana	Tahun									
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	RS Negeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	RS Swasta	1	1	1	2	3	3	3	3	3	4
3.	RS Khusus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Puskesmas Rawat Inap	5	5	5	5	5	5	5	5	7	9
5.	Puskesmas	13	13	13	13	13	15	15	15	13	11
6.	Puskesmas Pembantu	42	42	42	43	43	44	44	44	44	44
7.	BP Swasta	8	8	8	8	9	10	11	11	14	28
8.	Posyandu	1.002	1.008	-	-	996	1.014	1.014	1.032	1.040	1.049
9.	Apotik	2	2	2	10	10	11	19	22	26	30
10.	Toko Obat	0	0	3	3	3	3	5	5	5	4
11.	Laborat	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, DKK Jepara 2006

Tabel II.35.
Ratio Perkembangan Puskesmas dan Pustu dengan Penduduk
Kabupaten Jepara Tahun 1996 - 2005

No	Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Ratio Puskesmas Penduduk
1.	1996	60	858.549	14.309
2.	1997	60	866.566	14.442
3.	1998	60	871.332	14.522
4.	1999	61	880.627	14.436
5.	2000	61	970.945	15.917
6.	2001	64	976.767	15.261
7.	2002	64	979.025	15.297
8.	2003	64	1.039.872	16.248
9.	2004	64	1.059.638	16.556
10.	2005	64	1.078.837	16.844

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996 – 2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005, DKK Kab. Jepara 2006

Permasalahan pokok kesehatan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar. Jumlah TK (dan play group) pada tahun 1995 sebanyak 244 buah dengan murid 9.449 siswa, tahun 2005 menjadi 466 buah dengan murid 21.453 siswa. Jumlah Sekolah Dasar pada tahun 1995 sebanyak 646 buah dengan murid 107.885 siswa, tahun 2005

menjadi 756 buah dengan murid 127.827 siswa. Jumlah Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1995 sebanyak 53 buah dengan murid 17.970 siswa, tahun 2005 menjadi 147 buah dengan murid 48.359 siswa. Berdasarkan data di atas tampak bahwa ada peningkatan jumlah sekolah dan murid pada jenjang pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar. (Tabel II.36.)

Tabel II.36.
Jumlah Sekolah dan Murid Play Group, TK, SD, SMP/MTs
di Kabupaten Jepara Tahun 1995, dan 2000 – 2005

Keterangan	Tahun						
	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Play Group							
Kelas		0	0	3	7	15	22
Murid		0	0	90	360	705	1.094
TK							
Sekolah	244	334	370	411	431	455	466
Murid	9.449	17.406	18.871	19.549	20.030	20.847	21.453
SD/MI							
Sekolah	646	763	759	780	754	754	756
Murid	107.885	135.854	132.980	131.174	128.623	127.640	127.827
SMP/MTs							
Sekolah	53	135	135	137	142	144	147
Murid	17.970	38.872	38.947	44.976	45.954	46.466	48.359

Sumber: Jepara dalam Angka Tahun 1995 dan Dinas P dan K Kab. Jepara, 2005

Jumlah guru TK ada tahun 1995 sebanyak 445 orang, tahun 2005 menjadi 1.337 orang, guru SD sebanyak 5.309 orang (1995) menjadi 4.868 orang (2005), sedangkan guru SMP tahun 1995 sebanyak 1.031 orang menjadi 1.201 orang tahun 2005. Perkembangan nilai APK SD tahun 2001 sebesar 74,78 dan tahun 2005 menjadi 86,19, nilai APM SD tahun 2001 sebesar 59,06 dan tahun 2005 menjadi 62,15. Angka DO/putus sekolah SD/MI tahun 2003 sebesar 236 dan tahun 2005 sebesar 187, sedangkan perkembangan nilai APK SMP tahun 2001 sebesar 74,78 dan tahun 2005 sebesar 86,19, nilai APM tahun 2001 sebesar 59,06 dan tahun 2005 sebesar 62,15. Angka DO/putus sekolah tahun 2003 sebesar 608 dan tahun 2005 menjadi 877. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar. (Tabel II.37.)

Tabel II.37.
Jumlah Guru TK, SD, SMP di Kabupaten Jepara
Tahun 1995, dan 2000 – 2005

Keterangan	Tahun						
	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Guru TK	445	1.082	1.082	1.095	1.124	1.337	1.337
Guru SD	5.309	4.675	4.675	4.675	4.828	4.868	4.868
Guru SMP	1.031	1.027	1.027	1.034	1.171	1.201	1.201

Sumber: Jepara dalam Angka Tahun 1995 dan Dinas P dan K Kab. Jepara, 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sepak Takraw	20	32	32	34	35	43	43	46	46	46	46
Tenis Lapangan	18	20	22	22	23	24	26	25	25	25	25
Dayung	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah	550	640	651	667	684	690	719	750	796	796	796

Sumber: Jepara Dalam Angka 1995-2005

Permasalahan pokok kepemudaan dan olah raga adalah masih terbatasnya jumlah kelembagaan dan aktivitas kepemudaan, dan terbatasnya sarana dan prasarana, pembinaan dan kegiatan (*event*) olah raga.

Agama. Kabupaten Jepara mempunyai karakteristik penduduk yang relegius. Agama yang dianut penduduk Jepara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pada tahun 1996, jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 829.621 orang atau 96,50% dari jumlah penduduk (858.549 orang), pada tahun 2005 sebanyak 1.028.289 orang atau 95,31% dari jumlah penduduk (1.078.837 orang). Untuk kondisi tahun 2005, urutan jumlah pemeluk agama berikutnya adalah Kristen, Budha, Hindu dan Katholik. Jumlah tempat ibadah Masjid/Langgar/Mushola pada tahun 1996 sebanyak 3.710 buah, sedangkan tahun 2005 sebanyak 4.004 buah. Gereja berjumlah 84 buah (1995) menjadi 86 buah (2005). Permasalahan bidang keagamaan adalah masih terbatasnya jumlah sarana ibadah dan rendahnya kualitas pemahaman keagamaan serta rendahnya pengenalan nilai-nilai agama untuk masyarakat. (Tabel II.40. dan Tabel II.41.)

Tabel II.40.
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Jepara
Tahun 1996 – 2005

No	Agama	Tahun									
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *)	2004 *)	2005
1.	Islam	829.621	836.272	841.675	850.122	850.122	942.276	942.576	97,88	97,08	1.028.289
2.	Kristen	23.139	23.022	23.044	23.229	23.229	18.794	18.794	1,46	2,58	23.822
3.	Katholik	858	1.630	1.700	2.315	2.315	2.682	2.682	0,25	0,27	1.667
4.	Hindu	1.439	1.769	513	235	235	497	497	0,04	0,24	2.545
5.	Budha	3.492	3.873	4.400	4.726	4.726	4.352	4.352	0,35	0,30	3.073

Keterangan : *) Dalam Persentase

Sumber: Jepara Dalam Angka 1996-2005

Tabel II.41.
Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Agama	Tahun										
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Masjid	688	716	776	720	721	719	915	915	915	916	916
2.	Langgar	2.948	2.970	2.672	2.951	2.997	2.997	2.982	2.989	2.989	2.989	2.989
3.	Mushola	74	78	81	79	87	87	92	99	99	99	99
4.	Gereja	84	84	85	85	87	92	87	85	85	86	86

Sumber: Jepara Dalam Angka 1995 – 2005

Pemberdayaan Perempuan. Jumlah perempuan usia dewasa (usia 20-54 tahun), menunjukkan peningkatan, tahun 1995 sebanyak 189.017 orang (22,6%), tahun 2005 menjadi 264.176 orang (24,5%). Partisipasi perempuan di instansi pemerintah pada tahun 1995 sebanyak 3.658 orang atau 30,54% dari seluruh jumlah pegawai (11.977 orang); pada tahun 2005 sebanyak 5.221 orang atau 34,40% dari seluruh jumlah pegawai (15.174 orang). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di instansi pemerintah sebesar 3,86%. (Tabel II.42.).

Tabel II.42.
Jumlah Pegawai di Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Tahun	Banyaknya Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	1995	8.319	3.658	11.977
2.	1996	9.036	3.937	12.973
3.	1997	9.044	3.974	13.018
4.	1998	9.087	4.068	13.155
5.	1999	9.078	4.099	13.177
6.	2000	8.941	4.117	13.058
7.	2001	8.958	4.227	13.185
8.	2002	8.756	4.157	12.915
9.	2003	9.618	4.952	14.570
10.	2004	9.973	4.982	14.955
11.	2005	9.953	5.221	15.174

Sumber: Jepara Dalam Angka 1995 – 2005

Masalah pokok pemberdayaan perempuan adalah adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa perempuan lebih inferior dari pada laki-laki, belum adanya kesetaraan gender dalam berbagai pembangunan.

Perlindungan Sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdiri dari: usia lanjut, anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana pada tahun 1995 sebanyak 50.909 orang, tahun 2005 menjadi 59.135 orang. Jumlah PMKS terbanyak dengan peningkatan tertinggi adalah fakir miskin, dari 35.909 orang tahun 1995 menjadi 42.520 orang tahun 2005, penyandang cacat dari 3.124 orang (1995) menjadi 5.539 orang (2005), dan bekas napi dari 18 orang (1995) menjadi 378 orang (2005). (Tabel II.43.). Jumlah organisasi sosial dan panti sosial tahun 1995 sebanyak 18 buah, menjadi 31 buah tahun 2005. Jumlah pekerja sosial tahun 1995 sebanyak 1.458 orang, menjadi 1.145 orang tahun 2005. Permasalahan perlindungan sosial adalah masih tingginya angka PMKS dan belum terpadunya upaya penanggulangan PMKS. (Tabel II.44.)

Tabel II.43.
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Jepara Tahun 2000-2005

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun						
	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Lanjut usia terlantar	6.013	6.013	5.203	4.791	5.807	6.116	5.780
Anak terlantar	6.002	5.333	5.540	4.933	5.210	5.070	4.813
Keluarga fakir miskin	35.725	35.725	0	38.594	38.639	38.756	42.520
Penyandang cacat	3.124	2.640	3.837	5.935	4.701	5.573	5.539
Tuna susila	11	15	15	66	37	38	21
Gelandangan	4	3	5	2	5	5	5
Pengemis	12	11	11	41	46	59	79
Bekas narapidana	18	18	457	484	495	386	378
Jumlah	50.909	49.758	15.068	54.846	54.940	56.003	59.135

Sumber: Jepara Dalam Angka 1995 - 2005

Tabel II.44.
Perkembangan Organisasi Sosial
Kabupaten Jepara Tahun 1995, dan 2000 - 2005

Jenis Organisasi Sosial	Tahun						
	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pekerja sosial masyarakat	1.458	1.458	1.458	1.369	1.115	1.130	1.145
Karang taruna	193	193	194	194	194	194	194
Organisasi sosial dan panti sosial	18	18	27	27	27	29	31

Sumber: Kesbanglinsos Kabupaten Jepara, 2006

5. PRASARANA DAN SARANA

Penyehatan Lingkungan. Volume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya aktivitas masyarakat. Volume sampah padat tahun 1995 sebesar 145,5 m³, tahun 2005 menjadi 619,5 m³, atau rata-rata bertambah 31,7% per tahun. Jumlah sampah terangkut ke TPA tahun 1995 sebesar 107 m³ (72,2%), tahun 2005 menjadi 502 m³ (81%). Permasalahan persampahan adalah masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan dan bertambahnya volume sampah yang didaur ulang serta belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan. (Tabel II.45. dan Tabel II.46.)

Tabel II.45.
Perkembangan Sampah Kabupaten Jepara
Tahun 1996 - 2005

No	Perkembangan Sampah	Tahun									
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Volume sampah/hari-m ³	148,5	-	-	160	168,5	175	175,5	205	528	619,5
2.	Sampah terangkut - m ³	107,3	-	-	144	152	160	165,5	185	422,5	502
3.	Daerah pelayanan - Ha	674	7780	-	-	-	873	1170	2.026	2.443	3.116
4.	TPA - buah	-	-	-	1	2	3	4	4	4	4

Sumber: DKPPK Kabupaten Jepara, 2006

Tabel II.46.
Sarana Prasarana dan Pelayanan Persampahan
Kabupaten Jepara Tahun 1996 – 2005

Jenis Data	Tahun									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pengangkutan										
• Truk	7	7	7	7	7	8	8	9	9	9
• Pick Up	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
2. Tingkat Pembuangan										
• Transfer Depo	-	1	1	1	1	1	1	1	4	4
• Container	9	13	25	25	28	36	48	60	72	81
• TPS	12	14	21	24	25	25	33	36	36	39
• TPA	-	1	1	2	2	3	4	4	4	4
3. Volume Sampah (m ³)										
• Terkumpul	148,5	-	-	160	168,5	175	175,5	205	528	619,5
• Terangkut	107,3	-	-	144	152	160	165,5	185	422,5	502
4. Tingkat Pelayanan										
• Luas Daerah (ha)	674,5	780,6	-	-	-	673	1170	2026	2443	3116
• Penduduk (jwb)	38728	63691	-	-	-	44950	63691	115337	14146	164616
5. Retribusi (Juta)										
• Sampah	117,7	113,7	74,7	63,1	67,4	84,3	85,7	98,9	101,9	105,3
• Sedot Kaku	-	-	-	-	-	5,3	6,1	10,0	11,4	11,3

Sumber: DKPPK Kabupaten Jepara, 2006

Perumahan dan Permukiman. Pola pembangunan perumahan dan permukiman masih selaras dengan prasarana lingkungan yang sudah ada. Dilihat dari kelayakan rumah, tahun 1995 jumlah KK berumah tak layak huni sebanyak 7.801 KK, tahun 2005 menjadi 7.224 KK. Permasalahan pokok perumahan dan permukiman adalah kurang konsistennya pelaksanaan tata ruang, semakin keterbatasan lahan, pertumbuhan rumah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan kemampuan masyarakat. Disamping itu masih banyak perumahan kumuh serta masih banyaknya bangunan yang menempati tanah negara. (Tabel II.47.)

Tabel II.47.
Perkembangan Keluarga Berumah Tidak Layak
Kabupaten Jepara Tahun 1995, dan 2000 – 2005

Tahun	Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak
1995	7.801
2000	7.763
2001	6.984
2002	6.984
2003	7.095
2004	7.881
2005	7.224

Sumber: Badan Kesbanglinmas Kabupaten Jepara, 2006

Air Bersih. Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan, tahun 1995 sebanyak 4.629 pelanggan, menjadi 17.008 pelanggan tahun 2005. Volume air PDAM yang disalurkan juga mengalami peningkatan, tahun 1995 sebanyak

981.856 m³, menjadi 4.007.989 m³. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama tingkat kebutuhan akan air bersih dari PDAM semakin meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga ataupun non rumah tangga. Permasalahan pokok air bersih adalah masih banyak penduduk atau rumah tangga yang belum mendapatkan air bersih. (Tabel II.48.)

Tabel II.48.
Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

Tahun	Jumlah Pelanggan PDAM	Volume Air yang Disalurkan (m ³)
1995	4.629	981.856
1996	5.080	1.473.969
1997	5.651	1.786.007
1998	7.492	2.024.712
1999	8.771	2.544.777
2000	9.601	2.942.996
2001	11.118	3.356.150
2002	12.749	3.854.848
2003	14.213	4.065.898
2004	15.700	3.604.713
2005	17.008	4.007.989

Sumber: *Jepara Dalam Angka 1995 – 2005*

Pertamanan dan Penerangan Jalan. Perkembangan taman kota dilihat dari luasan taman mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, apabila tahun 1995 seluas 6.200 m², tahun 2005 sudah mencapai 38.156 m², mengalami peningkatan rata-rata sebesar 51,5% per tahun. Penerangan jalan umum tersebar di seluruh wilayah, tahun 1995 sebanyak 343 titik dan pada tahun 2005 sebanyak 1.264 titik atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,69% tiap tahun. (Tabel II.49.)

Tabel II.49.
Perkembangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Umum	Tahun										
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Kec. Jepara (titik)	184	224	261	295	332	367	403	415	420	614	622
2.	Kec. Tahunan (titik)	40	57	73	89	105	122	138	147	150	150	153
3.	Kec. Kodung (titik)	7	13	20	27	34	40	47	50	52	55	59
4.	Kec. Pecangan (titik)	43	54	64	73	83	94	104	106	108	120	123
5.	Kec. Kalinyamatan (titik)	-	-	-	-	-	-	14	16	18	21	24
6.	Kec. Balek (titik)	5	8	12	15	18	22	26	28	30	33	36
7.	Kec. Welahan (titik)	11	17	22	28	33	38	43	45	47	50	53
8.	Kec. Kelng (titik)	15	18	20	22	25	28	31	33	35	38	41
9.	Kec. Kembang (titik)	-	-	-	-	-	-	8	10	11	13	16
10.	Kec. Hlonggg (titik)	10	12	14	15	17	19	20	22	24	27	27
11.	Kec. Bangsn (titik)	11	16	19	23	26	30	33	36	38	42	45
12.	Kec. Nalumsari (titik)	-	-	-	-	-	-	16	18	20	23	26
13.	Kec. Mayong (titik)	17	19	21	23	25	27	30	32	34	37	40
	Jumlah titik	343	438	526	611	698	787	913	958	987	1223	1264

Sumber: *DKPPK Kabupaten Jepara Tahun 2006*

Permasalahan pertamanan dan penerangan jalan adalah keterbatasan jumlah ruang terbuka di perkotaan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun perawatan taman, terbatasnya titik penerangan jalan umum dan pemeliharaan oleh masyarakat.

6. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan Umum. Sampai dengan tahun 2005, secara administratif Kabupaten Jepara terbagi atas 14 wilayah Kecamatan dan 183 desa. (Tabel II.50.)

Tabel II.50.
Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

No	Jenis Data	Tahun										
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jml Kecamatan	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14
2	Jml Desa	181	182	183	183	183	183	183	183	183	183	183

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Jepara, 2006

Permasalahan pokok berkaitan dengan fungsi pemerintahan adalah bagaimana mempertahankan momentum reformasi dan memajukan penyelenggaraan otonomi baik pada tingkat Kabupaten maupun pada tingkat desa sehingga mampu bergerak dalam kerangka perwujudan *good governance* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu bagaimana mengoptimalkan kinerja perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesejahteraan Kepala Desa, disamping itu juga tingginya biaya Pilkades yang terdiri dari 4 kelurahan dan 183 desa.

Ketertiban dan Keamanan. Jumlah konflik di masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2004, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada, Jumlah personil Hansip dan Linmas mengalami peningkatan, tahun 1995 sebanyak 7.300 orang, menjadi 7.391 orang pada tahun 2005. (Tabel II.51.)

Tabel II.51.
Jumlah Hansip dan Pelanggaran PKL Kabupaten Jepara
Tahun 1995, dan 2000 – 2005

No	Jenis Data	TAHUN						
		1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jml Hansip	7.300	7.300	7.523	8.463	7.596	7.720	7.391
2	Jml Pelanggaran PKL	-	170	199	321	180	236	450

Sumber: Badan Kesbanglinsos Kabupaten Jepara, 2006

Jumlah pelanggaran ketertiban oleh Pedagang Kaki Lima, meningkat dari 170 kasus (2000) menjadi 450 kasus (2005). Permasalahan ketertiban dan keamanan adalah adanya konflik akibat proses demokratisasi, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum.

Pembinaan Hukum. Jumlah produk hukum daerah tahun 1995 sampai dengan 2005 cenderung berubah secara fluktuatif tergantung pada perubahan regulasi tingkat pusat dan tuntutan lokal. Jumlah Perda tahun 1995 sebanyak 23 buah dan Surat Keputusan (SK) Bupati sebanyak 722 buah, tahun 2000 jumlah Perda sebanyak 22 buah dan SK Bupati 795 buah, namun di tahun 2005 jumlah Perda dan SK Bupati cenderung menurun, Perda sebanyak 9 buah dan SK Bupati 165 buah. (Tabel II.52.)

Tabel II.52.
Produk Hukum Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

Produk Hukum	Tahun										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Peraturan daerah	23	2	5	18	17	22	19	17	15	12	9
Peraturan bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Keputusan bupati	722	1.199	738	1.378	933	795	682	265	236	173	165

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara, 2006

Permasalahan berkaitan dengan hukum adalah banyaknya perubahan peraturan di tingkat pusat, masih adanya produk hukum daerah yang belum sesuai dengan dinamika masyarakat dan pemerintahan.

Perpustakaan, Data, Informasi, dan Komunikasi. Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah pada tahun 2004 mencapai 3.297 buah, jumlah pengunjung meningkat dari 22.260 (2001) menjadi 39.788 (2005), atau mengalami kenaikan rata-rata 8,9% per tahun. Jumlah anggota sebanyak 1.104 pada tahun 1999 meningkat menjadi 28.427 pada tahun 2005. (Tabel II.53.)

Tabel II.53.
Perkembangan Jumlah Koleksi Buku dan Anggota Perpustakaan
Kabupaten Jepara Tahun 1999 – 2005

No	Jenis Data	Tahun							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1.	Jumlah koleksi Buku	2.809	2.285	1.325	3.253	3.902	2.408	3.297	
2.	Jumlah anggota								
	SD	166	429	784	1.188	1.643	2.160	2.775	
	SMP	291	812	1.509	2.337	3.270	4.420	5.686	
	SMA	236	724	1.448	2.356	3.664	5.324	7.232	
	Umum	411	1.040	2.280	3.988	6.268	9.174	12.734	
3.	Jumlah pengunjung			22.260	22.752	25.345	33.636	39.788	
4.	Jumlah Perpustakaan								
5.	TPS			28	56	25	38	44	
6.	TPM			16	30	10	28	14	

Sumber: Bapade Kabupaten Jepara, 2006

Teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Kabupaten Jepara yang telah digunakan adalah jaringan intranet maupun internet sebagai bagian dari pengembangan *e-government* yang menghubungkan semua unit pemerintah. Jumlah arsip dinamis in-aktif tahun 2001 berjumlah 2.422 buah, tahun 2005 mencapai 5.463 buah. Jumlah media cetak yang beredar di Kabupaten Jepara tahun 2004 sebanyak 8 buah, tahun 2005 menjadi 11 buah. Jumlah media penyiaran (radio) cenderung tetap, 5 buah. Permasalahan terkait dengan perpustakaan, data, informasi dan komunikasi adalah belum berkembangnya perpustakaan daerah, kurangnya kepedulian dan pemahaman pentingnya arsip, masih terbatasnya aplikasi sistem informasi dan komunikasi pada satuan kerja (terutama yang jauh lokasinya dari pusat kota).

Politik Lokal. Kabupaten Jepara terkenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi keragaman, kondisi ini berdampak pada terciptanya peluang setiap komponen masyarakat terlibat dalam penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif. Jumlah partai politik peserta Pemilu 1997 sebanyak 3 Parpol, Pemilu 1999 sebanyak 48 Parpol, Pemilu 2004 sebanyak 24 Parpol. Jumlah pemilih terdaftar tahun 1999 sebanyak 570.020 orang sedangkan jumlah pencoblos sebanyak 537.854 orang, atau dengan tingkat partisipasi sebesar 94,35%; pada tahun 2004 jumlah pemilih terdaftar sebanyak 733.415 orang, sedangkan jumlah pencoblos sebanyak 560.609 orang, atau dengan tingkat partisipasi sebesar 76,43%. Berdasarkan data diketahui bahwa situasi politik pada saat pemilu relatif aman terkendali, yang ditunjukkan dengan menurunnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu. Permasalahan politik lokal adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

Aset Daerah. Upaya pengamanan aset tidak bergerak yang berupa tanah baru mulai dilaksanakan pada tahun 2000 sebanyak 23 bidang tanah, yang kemudian berturut-turut sebanyak 11 bidang pada tahun 2001, 57 bidang pada tahun 2002, 23 bidang pada tahun 2003, 19 bidang pada tahun 2004 dan 58 bidang pada tahun 2005; sehingga secara keseluruhan aset yang berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat baru mencapai 191 bidang. Permasalahannya adalah belum optimalnya pendataan dan pengelolaan aset daerah yang dilindungi dengan status hak kepemilikan yang sah. (Tabel II.54.)

Tabel II.54.
Perkembangan Aset Bergerak dan Tidak Bergerak
Kabupaten Jepara Tahun 1995 – 2005

No	Jenis Data	Tahun										
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Roda 2	41	19	7	1	6	2	51	51	43	81	50
2.	Roda 4	5	18	7	1	2	9	12	12	20	14	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Meja	20	28	56	38	38	20	18	10	10	30	79
4.	Kursi	20	28	56	38	38	20	18	10	10	30	80
5.	Sertifikat tanah Pemda dan tanah wakaf						23	11	57	23	19	58

Sumber: Bagian Umum dan Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara, 2006

Kepegawaian dan Kelembagaan. Jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 1995 sebanyak 2.558 pegawai, tahun 2005 menjadi 8.763. Peningkatan tersebut karena terjadi pelimpahan pegawai dari instansi vertikal. Dari sisi kelembagaan, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Tabel II.55. dan Tabel II.56.)

Tabel II.55.
Perkembangan Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 1995 – 2005

Gol	Tahun										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
I	86	73	69	55	27	99	99	106	114	119	122
II	985	991	1.002	1.010	1.112	1.561	1.602	1.693	1.705	1.790	1.814
III	1.342	1.397	1.443	1.491	1.506	4.899	1.915	4.915	5.031	5.121	5.216
IV	145	157	163	182	193	1.286	1.327	1.431	1.561	1.607	1.611
JML	2.558	2.618	2.677	2.738	2.838	7.845	4.943	8.145	8.411	8.637	8.763

Sumber: BKD Kabupaten Jepara, 2006

Tabel II.56.
SOTK Pemerintah Kabupaten Jepara

SOTK	Tahun										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Setda	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dinas	13	13	13	13	13	10	10	10	13	13	13
Badan	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	5
Gantor	5	5	5	5	5	7	7	8	3	3	3
Kecamatan	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
Kelurahan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Desa	181	181	181	181	181	182	183	183	183	183	183

Sumber: Setda Bagian Hukum Pemkab Jepara, 2006

Permasalahan bidang aparatur dan kelembagaan adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparatur, masih perlu ditatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan tuntutan perubahan.

Pengawasan. Jumlah temuan selama tahun 1995 sampai dengan 2005 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1995 dari 170 obyek pemeriksaan ditemukan 263 temuan, pada tahun 2000 dari jumlah obyek sebanyak 98 ditemukan 147 temuan, sedangkan pada tahun 2005 dari 108 obyek pemeriksaan ditemukan 500 temuan. Uang negara yang berhasil diselamatkan kembali juga meningkat dari sejumlah Rp. 75.562.392 (1995) menjadi Rp. 271.093.510 (2005). Kondisi ini menunjukkan kinerja aparat pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. (Tabel II.57.) Permasalahan bidang pengawasan adalah meningkatnya jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian pada negara.

Tabel II.57.
Perkembangan Pemeriksaan Fungsional
Kabupaten Jepara Tahun 1995 – 2005

No	Tahun	Jenis Data						
		Jumlah Obyek Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Kasus Khusus	Jumlah Setoran ke Kas Daerah/ Negara
1	1995	170	170	263	263	263	12	75.562.392
2	1996	193	193	312	315	315	14	108.230.224
3	1997	208	208	244	251	251	16	49.124.120
4	1998	168	168	173	173	173	27	59.807.080
5	1999	175	175	193	193	193	14	49.040.120
6	2000	98	98	147	147	147	18	105.918.404
7	2001	144	144	456	456	456	16	130.109.245
8	2002	144	144	650	650	650	7	109.250.252
9	2003	144	144	476	476	476	4	197.520.115
10	2004	144	144	437	441	441	8	318.004.139
11	2005	108	108	500	500	500	8	271.093.510

Sumber : Bawasda Kabupaten Jepara, 2006

Pelayanan Publik. Kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari jumlah pelayanan yang ditangani unit pelayanan terpadu, tahun 2003 terdapat 11 jenis perijinan. Peningkatan pelayanan perijinan selama 3 tahun terakhir (2003-2005) yang meningkat pesat diantaranya adalah ijin gangguan/HO, SIUP, TDP dan IMB. (Tabel II.58.)

Tabel II.58.
Capaian Pelayanan Perijinan
Kabupaten Jepara Tahun 2003 – 2005

No	Uraian	Tahun		
		2003	2004	2005
1.	Ijin Gangguan / HO	545	605	1.198
2.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	570	745	1.347
3.	Tanda Daftar Perusahaan	284	752	1.351
4.	IUI dan Perluasan	124	292	339
5.	Ijin Mendirikan Bangunan	342	670	1.157
6.	Ijin Reklame	588	205	234
7.	Ijin Usaha Angkutan	83	107	318
8.	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Pemda	0	102	249
9.	Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	3	7	4
10.	Ijin Lokasi	8	2	5
11.	Ijin Usaha Pariwisata	37	8	4

Sumber: Kantor Yur. tap Kabupaten Jepara, 2005

Pelayanan publik yang lain adalah pelayanan kependudukan berupa pelayanan akte kelahiran, tahun 2001 dapat diselesaikan 15.009 akte, tahun 2005 mencapai 32.051 akte. Permasalahan pokok yang berkaitan dengan pelayanan umum adalah belum optimalnya kinerja pelayanan publik, karena masih terbatasnya kewenangan dan fungsi unit pelayanan terpadu.

B. PREDIKSI DAN ANALISIS KONDISI DAERAH

1. GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Letak Geografis. Kondisi geografis Kabupaten Jepara yang terletak di kawasan pesisir pantai Utara Pulau Jawa dengan potensi industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan akan dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) maka diprediksi akan berdampak pada peningkatan aktivitas pembangunan yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana lainnya.

Lingkungan Hidup. Kelestarian lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan kualitas, sebagai akibat aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan, seperti meningkatnya luas lahan kritis, banyaknya penggundulan

hutan, penambangan liar, dan tingginya pencemaran lingkungan, maka diprediksi kualitas lingkungan hidup akan semakin menurun. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

Tata Ruang dan Pertanian. Berkembangnya jumlah penduduk dan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor agraris ke sektor industri mengakibatkan perubahan pada tata guna lahan, dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Diprediksi pada dua puluh tahun yang akan datang kecenderungan ini akan semakin meningkat, karena adanya kebutuhan untuk pembangunan perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya.

2. DEMOGRAFI

Kependudukan. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun diprediksi mengalami penambahan yang cukup besar, pada tahun 2010 sebesar 1.206.540 jiwa, tahun 2015 sebesar 1.336.304 jiwa, tahun 2020 sebesar 1.466.068 jiwa, dan tahun 2025 sebesar 1.595.833 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas struktur umur penduduk yang semakin baik; sedangkan *sex ratio* perempuan dan laki-laki semakin berimbang, dan tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) yang semakin menurun, namun persebaran penduduk nampaknya masih terkonsentrasi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi. (Tabel II.59.)

Tabel II.59.
Prediksi Jumlah Penduduk
Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025

Tahun	Jml Penduduk
1	2
1995	835.007
1996	858.549
1997	866.566
1998	871.332
1999	880.627
2000	970.945
2001	976.767
2002	979.025
2003	1.039.827
2004	1.059.638
2005	1.078.837
2006	1.102.728
2007	1.128.681
2008	1.154.634
2009	1.180.587
2010	1.206.540
2011	1.232.492

1	2
2012	1.258.445
2013	1.284.398
2014	1.310.351
2015	1.336.304
2016	1.362.257
2017	1.388.210
2018	1.414.162
2019	1.440.115
2020	1.466.068
2021	1.492.021
2022	1.517.974
2023	1.543.927
2024	1.569.880
2025	1.595.833

Sumber: Diolah dari Jepara Dalam Angka Tahun 2000 – 2005

Keluarga Berencana. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana belum mantap. Diprediksikan dua puluh tahun yang akan datang Pasangan Usia Subur semakin meningkat, pada tahun 2010 sebesar 225.268 PUS, tahun 2015 sebesar 250.103 PUS, tahun 2020 sebesar 274.939 PUS, dan tahun 2025 sebesar 299.775 PUS. (Tabel II.60.). Besarnya peningkatan jumlah PUS dan kecenderungan penurunan peserta KB Aktif, diperkirakan potensi tingkat kelahiran semakin besar.

Tabel II.60.
Prediksi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025

Tahun	Jumlah PUS
1	2
1996	155.848
1997	158.238
1998	164.022
1999	168.912
2000	182.414
2001	181.846
2002	186.193
2003	190.963
2004	194.101
2005	198.354
2006	205.399
2007	210.366
2008	215.334
2009	220.301
2010	225.268
2011	230.235
2012	235.202
2013	240.169
2014	245.136
2015	250.103
2016	255.071

1	2
2017	260.038
2018	265.005
2019	269.972
2020	274.939
2021	279.906
2022	284.873
2023	289.840
2024	294.807
2025	299.775

Sumber: Diolah dari Kantor KBD Jepara, 2006

3. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Ekonomi Makro. Prediksi ekonomi didasarkan atas asumsi tidak ada guncangan yang berarti terhadap perekonomian secara nasional maupun regional, dan variabel-variabel makro ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, kurs mata uang relatif stabil, serta kebijakan pemerintah di bidang ekonomi (fiskal maupun moneter) pada jalur yang benar. Prediksi ekonomi makro akan akurat apabila hanya memprediksikan untuk periode satu tahun berikutnya namun untuk keperluan perencanaan jangka panjang diharapkan nilai PDRB dalam lima tahun pertama diharapkan mencapai sebesar Rp. 3.993.253,29 juta, lima tahun kedua mencapai sebesar Rp. 4.589.577,54 juta, lima tahun ketiga mencapai sebesar Rp. 5.185.901,78 juta dan lima tahun keempat mencapai sebesar Rp. 5.782.226,02 juta. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun pertama diharapkan rata-rata maksimal mencapai 4,74%, lima tahun kedua diharapkan rata-rata maksimal mencapai 5,51%, lima tahun ketiga diharapkan rata-rata maksimal mencapai 5,89%, dan lima tahun keempat diharapkan rata-rata maksimal mencapai 6,46%. (Tabel II.61. dan Tabel II.62.)

Tabel II.61.
Prediksi PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai PDRB
1	2
2000	2.813.210,31
2001	2.915.878,17
2002	3.032.806,33
2003	3.146.838,58
2004	3.272.708,72
2005	3.411.159,47
2006	3.516.193,90
2007	3.635.458,75
2008	3.754.723,60
2009	3.873.988,45

1	2
2010	3.993.253,29
2011	4.112.518,14
2012	4.231.782,99
2013	4.351.047,84
2014	4.470.312,69
2015	4.589.577,54
2016	4.708.842,39
2017	4.828.107,23
2018	4.947.372,08
2019	5.066.636,93
2020	5.185.901,78
2021	5.305.166,63
2022	5.424.431,48
2023	5.543.696,33
2024	5.662.961,17
2025	5.782.226,02

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 – 2005

Tabel II.62.
Prediksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025
(Dalam Persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan
1	2
2001	3,65
2002	4,01
2003	3,76
2004	4,00
2005	4,23
2006	4,28
2007	4,39
2008	4,51
2009	4,62
2010	4,74
2011	4,85
2012	4,97
2013	5,08
2014	5,20
2015	5,31
2016	5,43
2017	5,54
2018	5,66
2019	5,77
2020	5,89
2021	6,00
2022	6,12
2023	6,23
2024	6,35
2025	6,46

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara Tahun 1998 – 2005

Keuangan Daerah. Akibat penerapan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 nilai APBD meningkat cukup besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. APBD Kabupaten Jepara pada 20 tahun yang akan datang diprediksikan akan selalu meningkat, dengan asumsi dana sumbangan dari pusat selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun disamping sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Prediksi APBD pada lima tahun pertama diharapkan mencapai sebesar Rp. 608.675.950.000, lima tahun kedua diharapkan mencapai sebesar Rp. 799.894.275.000, lima tahun ketiga diharapkan mencapai sebesar Rp. 991.112.600.000, dan lima tahun keempat diharapkan mencapai sebesar Rp. 1.182.330.925.000. Untuk prediksi PAD lebih baik apabila hanya untuk periode satu tahun berikutnya namun guna keperluan perencanaan jangka panjang diharapkan nilai PAD dalam lima tahun pertama diharapkan mencapai sebesar Rp. 75.761.966.993,00, lima tahun kedua diharapkan mencapai sebesar Rp. 100.761.966.993,00, lima tahun ketiga diharapkan mencapai sebesar Rp. 125.761.966.993,00, dan lima tahun keempat diharapkan mencapai sebesar Rp. 150.761.966.993,00. (Tabel II.63.)

Tabel II.63.
Prediksi APBD dan PAD Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025

Tahun	APBD	PAD
1	2	3
1995	23.831.145.238	4,962,864,210
1996	32.345.608.046	5,996,357,782
1997	47.159.917.995	9,061,167,792
1998	84.520.987.918	12,715,348,424
1999	108.761.5666.437	12,374,290,465
2000	87.866.327.945	9,970,486,166
2001	257.532.589.674	20,099,327,976
2002	290.306.771.335	45,111,747,990
2003	370.344.030.830	53,740,237,824
2004	385.527.376.770	47,266,545,884
2005	401.140.563.519	50,761,966,993
2006	455.701.290.000	55,761,966,993
2007	493.944.955.000	58,071,597,993
2008	532.188.620.000	63,071,597,993
2009	570.432.285.000	68,071,597,993

1	2	3
2010	608.675.950.000	73,071,597,993
2011	646.919.615.000	78,071,597,993
2012	685.163.280.000	83,071,597,993
2013	723.406.945.000	88,071,597,993
2014	761.650.610.000	93,071,597,993
2015	799.894.275.000	98,071,597,993
2016	838.137.940.000	103,071,597,993
2017	876.381.605.000	108,071,597,993
2018	914.625.270.000	113,071,597,993
2019	952.868.935.000	118,071,597,993
2020	991.112.600.000	123,071,597,993
2021	1.029.356.265.000	128,071,597,993
2022	1.067.599.930.000	133,071,597,993
2023	1.105.843.595.000	138,071,597,993
2024	1.144.087.260.000	143,071,597,993
2025	1.182.330.925.000	148,071,597,993

Sumber: Diolah dari Dispenda Kabupaten Jepara, 2006

Perdagangan. Berdasarkan data sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun-tahun mendatang diproyeksikan cenderung meningkat dan semakin besar volume transaksi maupun nilainya. Peluang pengembangan pasar tujuan ekspor yang non konvensional masih besar, namun tetap harus memperhatikan standar perdagangan internasional seperti *ecolabelling* dan ISO, serta persaingan dari daerah/negara lain, sehingga diperlukan diserifikasi usaha sektor industri lain. Kondisi PDRB sektor perdagangan hasil prediksi untuk empat titik tahun yang akan datang adalah tahun 2010 sebesar Rp. 773.325,62 juta, tahun 2015 sebesar Rp. 863.371,34 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 953.417,06 juta, dan tahun 2025 sebesar Rp. 1.043.462,77 juta. (Tabel II.64.)

Tabel II.64.
Prediksi Sektor Perdagangan Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Perdagangan
1	2
2000	595.450,03
2001	611.121,01
2002	629.223,92
2003	643.489,84
2004	662.310,06
2005	687.947,42
2006	701.289,05
2007	719.298,19

1	2
2008	737.307,34
2009	755.316,48
2010	773.325,62
2011	791.334,77
2012	809.343,91
2013	827.353,05
2014	845.362,20
2015	863.371,34
2016	881.380,48
2017	899.389,63
2018	917.398,77
2019	935.407,91
2020	953.417,06
2021	971.426,20
2022	989.435,34
2023	1.007.444,49
2024	1.025.453,63
2025	1.043.462,77

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara, 1998 dan 2005

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Koperasi dan UKM telah menjadi penyelamat perekonomian ketika krisis ekonomi melanda negara kita. Selain itu koperasi dan UKM mampu menyerap tenaga kerja sangat besar. Hasil-hasil koperasi dan UKM akan semakin meningkat di masa mendatang, dan mampu menjadi penopang ekonomi rakyat. Perkembangan Koperasi dan UKM dari sisi jumlah, kegiatan dan volume usaha dua puluh tahun yang akan datang diperkirakan akan meningkat.

Tenaga Kerja. Jumlah penduduk dan tenaga kerja akan mengalami peningkatan yang semakin besar pada dua puluh tahun mendatang, meskipun disisi lain lapangan kerja relatif terbatas. Apabila tidak diantisipasi sejak dini akan menambah pengangguran dan beban pemerintah. Pengangguran yang besar akan menciptakan disinsentif bagi perekonomian dan memicu berbagai kerawanan sosial.

Pertanian. Pada tahun-tahun mendatang diproyeksikan nilai hasil sektor pertanian cenderung menurun. Namun untuk mengatasi hal tersebut masih terbuka peluang untuk mengembangkan produk agro industri sebagai salah satu ekspor strategis. Berdasarkan hasil prediksi sampai tahun 2025, pada empat titik tahun adalah: tahun 2010 sebesar Rp. 997.721,96 juta, tahun 2015 sebesar Rp. 1.149.268,93 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 1.300.815,90 juta, dan tahun 2025 sebesar Rp. 1.452.362,87 juta. Sektor pertanian secara luas akan mengalami kejenuhan dan cenderung menurun, namun dalam perkembangan kontribusi PDRB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Oleh

karena itu perlu dukungan kebijakan pemerintah yang memihak para petani. Pertanian mutlak harus dikembangkan di Jepara, mengingat sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menopang pertumbuhan sektor-sektor yang lain. (Tabel II.65.)

Tabel II.65.
Prediksi Sektor Pertanian Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Pertanian
2000	691.717,71
2001	721.057,68
2002	762.817,18
2003	792.332,95
2004	809.671,47
2005	844.812,04
2006	876.484,38
2007	906.793,78
2008	937.103,17
2009	967.412,57
2010	997.721,96
2011	1.028.031,35
2012	1.058.340,75
2013	1.088.650,14
2014	1.118.959,54
2015	1.149.268,93
2016	1.179.578,32
2017	1.209.887,72
2018	1.240.197,11
2019	1.270.506,51
2020	1.300.815,90
2021	1.331.125,29
2022	1.361.434,69
2023	1.391.744,08
2024	1.422.053,48
2025	1.452.362,87

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara, 1998 dan 2005

Pengaliran. Akibat adanya kerusakan hutan di daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya resapan air tanah sehingga cadangan air tanah berkurang. Kerusakan bangunan air akibat adanya bencana alam banjir dan usia bangunan yang sudah tua serta adanya bangunan yang belum permanen, dan pengambilan batu. Guna meningkatkan produktivitas pertanian maka perlu adanya penghijauan, normalisasi bendung, irigasi dan anak-anak sungai.

Pertambangan dan Energi. Nilai sumbangan sektor pertambangan dan energi relatif kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam menciptakan pendapatan regional. Namun demikian sektor ini sangat penting dalam

menunjang pertumbuhan sektor lainnya, khususnya sektor industri. Sektor ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan dan mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara, meskipun tidak sebesar sektor lainnya.

Namun demikian sektor ini menjadi penting peranannya pada saat rencana pengembangan energi nuklir untuk pembangkit listrik direalisasi. Diprediksi sektor ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Berdasarkan hasil prediksi PDRB sektor pertambangan dan penggalian tampak bahwa tahun 2010 sebesar Rp. 22.152,17 juta, tahun 2015 sebesar Rp. 26.847,54 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 31.542,90 juta, dan tahun 2025 sebesar Rp. 36.238,27 juta. (Tabel II.66.)

Tabel II.66.
Prediksi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kab. Jepara
Tahun 2005 – 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Pertambangan dan Penggalian
2000	13.171,48
2001	13.692,87
2002	14.190,56
2003	15.247,48
2004	16.507,63
2005	17.844,75
2006	18.395,88
2007	19.334,96
2008	20.274,03
2009	21.213,10
2010	22.152,17
2011	23.091,25
2012	24.030,32
2013	24.969,39
2014	25.908,47
2015	26.847,54
2016	27.786,61
2017	28.725,68
2018	29.664,76
2019	30.603,83
2020	31.542,90
2021	32.481,98
2022	33.421,05
2023	34.360,12
2024	35.299,19
2025	36.238,27

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara, 1998 dan 2005

Perindustrian. Sektor industri akan menghadapi tantangan yang berat pada era globalisasi saat ini. Persaingan dengan produk regional dan internasional yang lebih baik kualitasnya dan lebih murah harganya akan mempengaruhi industri dalam negeri. Nilai sektor industri selama 10 tahun terakhir cenderung selalu meningkat; hasil prediksi PDRB sektor industri pengolahan mempunyai

kecenderungan yang positif/meningkat untuk 20 tahun yang akan datang, tampak bahwa tahun 2010 sebesar Rp. 1.040.257,60 juta, tahun 2015 sebesar Rp. 1.154.186,72 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 1.268.115,85 juta, dan tahun 2025 sebesar Rp. 1.382.044,97 juta. (Tabel II.67.)

Tabel II.67.
Prediksi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Industri Pengolahan
2000	813.448,29
2001	836.712,36
2002	859.932,45
2003	873.110,09
2004	901.598,32
2005	931.381,96
2006	949.114,30
2007	971.900,12
2008	994.685,95
2009	1.017.471,77
2010	1.040.257,60
2011	1.063.043,42
2012	1.085.829,25
2013	1.108.615,07
2014	1.131.400,90
2015	1.154.186,72
2016	1.176.972,55
2017	1.199.758,37
2018	1.222.544,20
2019	1.245.330,02
2020	1.268.115,85
2021	1.290.901,67
2022	1.313.687,50
2023	1.336.473,32
2024	1.359.259,15
2025	1.382.044,97

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara, 1998 dan 2005

Namun untuk mencapai target-target tersebut perlu diperhitungkan dampak dari inflasi, bahan baku yang semakin langka, persaingan pasar yang semakin ketat, kebutuhan modal yang mencukupi serta teknologi yang tepat guna meningkatkan mutu dan kualitas produk.

Transportasi dan Telekomunikasi. Sektor perhubungan dan telekomunikasi merupakan sarana vital dalam memperlancar aktivitas perekonomian baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor ini diproyeksikan akan semakin besar pada tahun-tahun mendatang. Hasil prediksi PDRB sektor transportasi mempunyai kecenderungan yang meningkat untuk 20 tahun yang akan datang, tampak bahwa tahun 2010

sebesar Rp. 210.261,09 juta, tahun 2015 sebesar Rp. 235.460,47 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 260.659,84 juta, dan tahun 2025 sebesar Rp. 285.859,21 juta. (Tabel II.68.)

Tabel II.68.
Prediksi Sektor Transportasi dan Telekomunikasi Kab. Jepara
Tahun 2005 – 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Sektor Transportasi dan Telekomunikasi
2000	160.724,42
2001	165.161,62
2002	169.016,48
2003	173.894,49
2004	179.625,72
2005	186.349,48
2006	190.101,60
2007	195.141,47
2008	200.181,35
2009	205.221,22
2010	210.261,09
2011	215.300,97
2012	220.340,84
2013	225.380,72
2014	230.420,59
2015	235.460,47
2016	240.500,34
2017	245.540,22
2018	250.580,09
2019	255.619,97
2020	260.659,84
2021	265.699,71
2022	270.739,59
2023	275.779,46
2024	280.819,34
2025	285.859,21

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Jepara, 1998 dan 2005

Pertumbuhan sektor ekonomi secara luas membutuhkan dukungan prasarana transportasi, khususnya prasarana jalan. Diprediksi kualitas panjang jalan beraspal mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sepanjang 924,21 Km, tahun 2015 sepanjang 1.084,34 Km, tahun 2020 sepanjang 1.244,46 Km dan tahun 2025 sepanjang 1.404,59 Km. Pertambahan panjang jalan ini akan dapat terlaksana dengan asumsi adanya penambahan dan perkembangan mobilitas penduduk dan tidak adanya rekayasa model transportasi. (Tabel II.69.)

Tabel II.69.
Prediksi Panjang Jalan Aspal
Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025

Tahun	Panjang Jalan Aspal (Km)
1995	410,06
1996	410,58
1997	455,27
1998	627,53
1999	642,63
2000	627,53
2001	683,18
2002	675,77
2003	703,68
2004	703,68
2005	703,68
2006	796,11
2007	828,14
2008	860,16
2009	892,19
2010	924,21
2011	956,24
2012	988,26
2013	1.020,29
2014	1.052,31
2015	1.084,34
2016	1.116,36
2017	1.148,39
2018	1.180,41
2019	1.212,44
2020	1.244,46
2021	1.276,49
2022	1.308,51
2023	1.340,54
2024	1.372,56
2025	1.404,59

Sumber: Diolah dari Jepara Dalam Angka 1995 – 2005

Pariwisata dan Budaya. Perkembangan objek wisata 10 tahun terakhir mengalami stagnasi, tidak terdapat penambahan objek wisata baru. Oleh karena itu pengembangan obyek wisata alam terutama obyek wisata bahari (perikanan dan kelautan) masih sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai obyek wisata andalan Kabupaten Jepara. Diprediksi untuk dua dasa warsa yang akan datang jumlah objek wisata relatif tetap, namun kualitasnya semakin meningkat. Perkembangan jumlah wisatawan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 33.629 wisatawan per tahun. Prediksi jumlah wisatawan tahun 2010 sebesar 929.687 wisatawan, tahun 2015 sebesar 1.097.822, tahun 2020 sebesar 1.265.957, dan tahun 2025 sebesar 1.437.091 wisatawan. (Tabel II.70.)

Tabel II.70.
Prediksi Jumlah Pengunjung Wisata
Tahun 2005 – 2025

Tahun	Pengunjung Wisatawan
1995	491.277
1996	517.158
1997	561.469
1998	576.992
1999	373.876
2000	420.838
2001	587.862
2002	599.673
2003	776.446
2004	790.323
2005	831.682
2006	795.179
2007	828.806
2008	862.433
2009	896.060
2010	929.687
2011	963.314
2012	996.941
2013	1.030.568
2014	1.064.195
2015	1.097.822
2016	1.131.449
2017	1.165.076
2018	1.198.703
2019	1.232.330
2020	1.265.957
2021	1.299.583
2022	1.333.210
2023	1.366.837
2024	1.400.464
2025	1.434.091

Sumber: Diolah dari Disparta Kab Jepara diolah

Perkembangan jumlah wisatawan tersebut di atas akan diikuti dengan berkembangnya komponen pendukung wisata, seperti: hotel, restoran, dan transportasi, kelompok kesenian dan budaya. Namun perlu untuk diperhatikan persaingan dalam menarik wisatawan bahari pada masa yang akan datang akan semakin ketat khususnya di lingkup regional. Guna untuk mengatasi persaingan sektor parwisata dan budaya maka pada masa yang akan datang perlu untuk selalu meningkatkan kualitas objek wisata dan kesenian budaya.

4. SOSIAL BUDAYA

Kesehatan. Bergesernya pola hidup masyarakat dan pola makan yang tidak sehat cenderung mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan

masyarakat. Diprediksi pada dua puluh tahun yang akan datang terjadi peningkatan jenis dan jumlah penyakit yang ada di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, sebuah Puskesmas melayani 11.310 orang, maka rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Jepara lebih rendah, tahun 2005 sebuah Puskesmas melayani 16.844 orang. Prediksi rasio Puskesmas dengan penduduk untuk dua puluh tahun yang akan datang adalah satu Puskesmas melayani 18.157 orang (2010), 19.616 orang (2015), 21.076 orang (2020), dan melayani 22.536 orang pada tahun 2025. Kondisi demikian membutuhkan perbaikan rasio antara penduduk dengan jumlah Puskesmas (rasio ideal nasional, satu Puskesmas melayani kurang lebih 20.000 orang penduduk) dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan. (Tabel II.71.)

Tabel II.71.
Prediksi Ratio Puskesmas Dengan Penduduk Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025

Tahun	Ratio Puskesmas Dengan Penduduk
1996	14.309
1997	14.442
1998	14.522
1999	14.436
2000	15.917
2001	15.261
2002	15.297
2003	16.248
2004	16.556
2005	16.844
2006	16.989
2007	17.281
2008	17.573
2009	17.865
2010	18.157
2011	18.449
2012	18.741
2013	19.032
2014	19.324
2015	19.616
2016	19.908
2017	20.200
2018	20.492
2019	20.784
2020	21.076
2021	21.368
2022	21.660
2023	21.952
2024	22.244
2025	22.536

Sumber: Diolah dari Jepara Dalam Angka 1996 – 2005

Pendidikan. Pertambahan penduduk selama 10 tahun terakhir yang mengalami peningkatan, khususnya penduduk usia sekolah diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Diprediksikan kebutuhan jumlah sekolah sebagai berikut: pada tahun 2010, SD sebanyak 733 buah, SMP sebanyak 155 buah, SMA sebanyak 63 buah, pada tahun 2015, SD sebanyak 697 buah, SMP sebanyak 190 buah, SMA sebanyak 79 buah, tahun 2020, SD sebanyak 661 buah, SMP sebanyak 225 buah, dan SMA sebanyak 95 buah, sedangkan pada tahun 2025, SD sebanyak 625 buah, SMP sebanyak 260 buah, dan SMA sebanyak 111 SLTA. Berdasarkan hasil prediksi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. (Tabel II.72.)

Tabel II.72.
Prediksi Kebutuhan Jumlah Sekolah SD, SLTP dan SLTA
Kabupaten Jepara 2005 – 2025

Tahun	Prediksi Kebutuhan Sekolah		
	SD	SLTP	SLTA
1995	646	53	28
2000	763	135	51
2001	759	135	53
2002	780	137	56
2003	754	142	62
2004	754	144	65
2005	756	147	65
2006	761	127	51
2007	754	134	54
2008	747	141	57
2009	740	148	60
2010	733	155	63
2011	726	162	67
2012	718	169	70
2013	711	176	73
2014	704	183	76
2015	697	190	79
2016	690	197	83
2017	683	204	86
2018	675	211	89
2019	668	218	92
2020	661	225	95
2021	654	232	99
2022	647	239	102
2023	640	246	105
2024	632	253	108
2025	625	260	111

Sumber: Diolah dari Jepara Dalam Angka 1996 – 2005

Agama. Sebagai dampak adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi sekarang ini, akan berpengaruh terhadap perubahan persepsi, sikap dan perilaku masyarakat, yang pada akhirnya dapat

mengurangi peran nilai-nilai budaya luhur bangsa. Dalam kondisi demikian, peranan nilai-nilai religius atau keagamaan akan semakin penting untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa masyarakat.

Pemuda dan Olah Raga. Jumlah penduduk yang berusia muda diprediksikan semakin meningkat, dengan demikian diperlukan media untuk penyaluran aktivitas kepemudaan, seperti organisasi kepemudaan, kesenian, sosial, dan olah raga. Olah raga sebagai media pengembangan prestasi dan rekreasi yang menjadi kebutuhan masyarakat diprediksi akan semakin meningkat.

Pemberdayaan Perempuan. Bertambahnya jumlah penduduk perempuan dan meningkatnya kualitas perempuan pada sepuluh tahun terakhir, diprediksikan jumlah tuntutan kesetaraan gender pada setiap aktivitas pembangunan akan semakin meningkat. Tuntutan yang diprediksi muncul pada masa yang akan datang antara lain peningkatan partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan, politik, peningkatan perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

Perlindungan Sosial. Dalam sepuluh tahun terakhir, penyandang masalah sosial cenderung mengalami peningkatan, diprediksi dua puluh tahun yang akan datang jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial akan semakin bertambah. Peningkatan tersebut apabila tidak diantisipasi akan berpeluang mengganggu kondisi kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan.

5. PRASARANA DAN SARANA

Penyehatan Lingkungan. Dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang volume sampah akan semakin bertambah besar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk. Diprediksikan pada tahun 2010 jumlah timbunan sampah sebesar 898,07 m³, tahun 2015 sebesar 1.277,98 m³, tahun 2020 sebesar 1.657,89 m³, dan tahun 2025 sebesar 2.037,80 m³. Penambahan volume timbunan sampah tersebut diprediksi akan membutuhkan peningkatan sarana prasarana kebersihan seperti TPA, TPS, alat pengangkut sampah, tenaga kebersihan. (Tabel II.73.)

Tabel II.73.
Prediksi Jumlah Timbunan Sampah
Kabupaten Jepara 2005-2025

Tahun	Prediksi Timbunan Sampah (m ³)
1	2
1999	160,00
2000	168,50

1	2
2001	175,00
2002	175,50
2003	205,00
2004	528,00
2005	619,50
2006	594,14
2007	670,13
2008	746,11
2009	822,09
2010	898,07
2011	974,05
2012	1.050,04
2013	1.126,02
2014	1.202,00
2015	1.277,98
2016	1.353,96
2017	1.429,95
2018	1.505,93
2019	1.581,91
2020	1.657,89
2021	1.733,88
2022	1.809,86
2023	1.885,84
2024	1.961,82
2025	2.037,80

Sumber: Diolah dari DKPPK Kabupaten Jepara, 2006

Perumahan dan Permukiman. Prediksi perumahan dua puluh tahun yang akan datang akan mengikuti kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk, dimana semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar kebutuhan akan rumah. Pertumbuhan perumahan akan membutuhkan lahan yang luas dan akan mengakibatkan bergesernya fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman serta membutuhkan dukungan fasilitas perumahan dan permukiman yang memadai.

Air Bersih. Pertumbuhan jumlah penduduk, luas permukiman dan industri akan membutuhkan dukungan ketersediaan fasilitas air bersih yang cukup. Prediksi jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan akan meningkat dua puluh tahun yang akan datang, tahun 2010 jumlah pelanggan sebanyak 23.176 pelanggan dan volume 5.964.443 m³, tahun 2015 jumlah pelanggan sebanyak 29.672 pelanggan dan volume 7.553.759 m³, tahun 2020 jumlah pelanggan sebanyak 36.169 pelanggan dan volume 9.143.075 m³, dan tahun 2025 jumlah pelanggan sebanyak 42.665 pelanggan dan volume 10.732.392 m³. (Tabel II.74.)

Tabel II.74.
Prediksi Jumlah Pelanggan dan Volume Air yang Disalurkan PDAM
Kabupaten Jepara
Tahun 2005 – 2025

Tahun	Prediksi Pelanggan PDAM	Prediksi Volume Air yang Disalurkan (m ³)
1995	4.629	981.856
1996	5.080	1.473.969
1997	5.651	1.786.007
1998	7.492	2.024.712
1999	8.771	2.544.777
2000	9.601	2.942.996
2001	11.118	3.356.150
2002	12.749	3.854.848
2003	14.213	4.065.898
2004	15.700	3.604.713
2005	17.008	4.007.989
2006	17.979	4.692.990
2007	19.278	5.010.853
2008	20.577	5.328.717
2009	21.877	5.646.580
2010	23.176	5.964.443
2011	24.475	6.282.306
2012	25.774	6.600.170
2013	27.074	6.918.033
2014	28.373	7.235.896
2015	29.672	7.553.759
2016	30.972	7.871.623
2017	32.271	8.189.486
2018	33.570	8.507.349
2019	34.869	8.825.212
2020	36.169	9.143.076
2021	37.468	9.460.939
2022	38.767	9.778.802
2023	40.067	10.096.666
2024	41.366	10.414.529
2025	42.665	10.732.392

Sumber: Diolah dari Jepara Dalam Angka 1995 – 2005

Pertamanan dan Penerangan Jalan. Pertambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah perumahan dan permukiman, peningkatan aktivitas pembangunan di semua sektor membutuhkan dukungan penyediaan ruang publik untuk fasilitas taman kota dan penerangan jalan umum yang memadai. Prediksi jumlah titik lampu penerangan jalan umum akan semakin meningkat, apabila dihitung berdasarkan pertumbuhan rata-rata maka pada tahun 2010 menjadi 1.708 titik, tahun 2015 menjadi 2.164 titik, tahun 2020 sebanyak 2.620 titik dan tahun 2025 sebanyak 3.077 titik. (Tabel II.75.)

Tabel II.75.
Prediksi Jumlah Titik Penerangan Jalan
Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025

Tahun	Prediksi Penerangan Jalan
1995	343
1996	438
1997	526
1998	611
1999	698
2000	787
2001	913
2002	958
2003	987
2004	1.223
2005	1.264
2006	1.343
2007	1.434
2008	1.525
2009	1.617
2010	1.708
2011	1.799
2012	1.890
2013	1.982
2014	2.073
2015	2.164
2016	2.255
2017	2.347
2018	2.438
2019	2.529
2020	2.620
2021	2.712
2022	2.803
2023	2.894
2024	2.985
2025	3.077

Sumber: Diolah dari DKPPK Kabupaten Jepara, 2006

6. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Ketertiban dan Keamanan. Kondisi ketertiban dan keamanan dalam 10 tahun terakhir relatif stabil, namun demikian melihat dinamika kehidupan yang semakin kompleks diprediksi untuk 20 tahun mendatang akan terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang cenderung meningkat adalah pelanggaran terhadap peraturan daerah, pelanggaran lalu lintas, pertikaian antar kelompok masyarakat dan pencurian serta gangguan penyakit masyarakat lainnya.

Produk Hukum Daerah. Tuntutan reformasi di segala bidang pembangunan dan era globalisasi berakibat pada meningkatnya tuntutan masyarakat atas tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Prediksi kebutuhan akan produk hukum dua puluh tahun ke depan akan meningkat baik berupa revisi produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat maupun produk-produk hukum baru. Penegakan hukum memerlukan profesionalisme aparatur dan perangkat hukum lainnya.

Perpustakaan, Data, Informasi, dan Komunikasi. Melihat kecenderungan perubahan sosial yang mengedepankan penggunaan teknologi informatika pada setiap bidang pembangunan. Diprediksikan dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan kebutuhan penguasaan teknologi Informatika akan semakin meningkat sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi, khususnya penerapan *e-government*.

Politik Lokal. Diprediksi tuntutan untuk penyaluran aspirasi politik masyarakat akan semakin meningkat untuk dua puluh tahun ke depan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan demokratisasi lokal. Apabila tidak maka pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan PilkaDes akan meningkatkan suhu politik, terutama menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan. Konflik-konflik politik yang akan muncul antara lain perselisihan antar simpatisan Parpol dan pelanggaran aturan pemilihan umum.

Aset Daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, aset sebagai bentuk kekayaan daerah perlu dikelola dengan sistem administrasi yang baik sehingga menjamin aspek keamanannya. Prediksi dua puluh tahun ke depan aset daerah memegang peranan yang cukup penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan media pelayanan kepada masyarakat.

Kepegawaian dan Kelembagaan. Implementasi kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi meningkatnya jumlah aparatur daerah seiring dengan kewenangan yang dilimpahkan. Diprediksi jumlah aparatur daerah akan bertambah sesuai dengan fungsi dan beban kerja serta tuntutan pelayanan masyarakat. Untuk aspek kelembagaan, diprediksi dua puluh tahun ke depan tuntutan penerapan manajemen modern akan meningkat untuk memberikan kinerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kelembagaan sektor publik harus mampu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, globalisasi maupun perkembangan teknologi dan informasi serta kerjasama antar wilayah/daerah

yang melibatkan berbagai komponen. Namun untuk mengembangkan kerjasama daerah masih perlu ditata berbagai regulasi yang mendukung.

Pengawasan. Seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas persoalan manajemen dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan, dua puluh tahun ke depan diprediksi keperluan pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sangat diperlukan dalam upaya mengurangi penyimpangan penyakit birokrasi, terutama KKN.

Pelayanan Publik. Kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berkembang, diprediksikan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat. Tuntutan yang diharapkan antara lain pengembangan sistem manajemen pelayanan perijinan, kualitas pelayanan publik yang memperhatikan dan mengutamakan hak-hak publik melalui penggunaan teknologi informasi dan penerapan regulasi pengembangan pelayanan publik berstandar internasional (ISO).

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAERAH

1. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi, analisis ini dibangun melalui *environmental scanning* terhadap semua faktor internal (*present* dan *controlable*) yang dimiliki dan faktor eksternal (*future* dan *uncontrolable*) yang dihadapi Kabupaten Jepara dua puluh tahun yang akan datang. Hasil analisis lingkungan strategis (*SWOT Analysis*) atas kondisi lingkungan strategis daerah dalam identifikasi berikut ini:

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang industri.
- 2) Potensi sektor pertanian.
- 3) Kekayaan bahan tambang dan galian.
- 4) Potensi obyek wisata.
- 5) Sumber daya manusia yang religius dan beretos kerja tinggi.
- 6) Kehidupan sosial dan politik lokal yang kondusif.
- 7) Tingginya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 8) Dukungan Pemerintah Daerah terhadap lembaga kemasyarakatan.
- 9) Besarnya potensi sumber pendapatan daerah.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Terbatasnya sumber daya alam (bahan baku) dan teknologi produksi pendukung industri.
- 2) Rendahnya Investasi bidang agro Industri.
- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan.
- 4) Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pengembangan pariwisata daerah.
- 5) Belum meratanya persebaran sarana prasarana dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 6) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masih banyaknya jumlah penyandang masalah sosial.
- 7) Masih terdapatnya kecenderungan perbedaan yang mengarah pada terciptanya konflik sosial.
- 8) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan yang ada di masyarakat.
- 9) Belum optimalnya kemampuan keuangan daerah.

c. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Terbukanya pasar tujuan ekspor non konvensional.
- 2) Tingginya permintaan produk agro industri di pasar internasional.
- 3) Tersedianya teknologi pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.
- 4) Besarnya daya tarik wisata perikanan dan kelautan (bahari).
- 5) Tersedianya dukungan regulasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 6) Terbukanya peluang penyaluran aspirasi politik (demokratisasi).
- 7) Potensi pengembangan kerjasama pembangunan antar wilayah/daerah yang melibatkan berbagai komponen daerah.

d. Tantangan (*Threat*)

- 1) Adanya batasan *Ecolabelling* dalam perdagangan bebas.
- 2) Tuntutan stabilitas keamanan dan politik yang semakin tinggi.
- 3) Penerapan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih terbatas.
- 4) Kompetisi regional dalam pengembangan potensi wisata bahari.
- 5) Tingginya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
- 6) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 7) Belum mendukungnya kebijakan/regulasi pengembangan kerjasama antar daerah.

2. ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis daerah, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Jepara dua puluh tahun yang akan datang, yaitu:

a. Isu Strategis Kelompok Kekuatan-Peluang, adalah:

- 1) Meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif untuk ekspor.
- 2) Meningkatkan produksi sektor pertanian dan industri guna memenuhi permintaan agro industri di pasar internasional.
- 3) Meningkatkan pengelolaan bahan tambang dan galian dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.
- 4) Mengembangkan potensi wisata dengan dukungan regulasi pemerintah yang kondusif untuk menciptakan daya tarik wisata.
- 5) Sumber daya manusia yang religius dan beretos kerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 6) Pengembangan kehidupan sosial politik lokal yang kondusif sehingga tercipta iklim demokratisasi dan partisipasi dalam pembangunan.
- 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan pembangunan antar wilayah yang melibatkan berbagai komponen daerah.
- 8) Dukungan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan potensi kerjasama antar wilayah.

b. Isu Strategis Kelompok Kekuatan-Tantangan, adalah:

- 1) Optimalisasi keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang industri untuk mengatasi batasan *ecolabelling* dalam pasar besar
- 2) Optimalisasi potensi daya wisata untuk mengatasi kompetisi regional dalam pengembangan potensi bahari.
- 3) Optimalisasi potensi sumber daya pendapatan daerah untuk mengatasi tingginya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
- 4) Tingginya peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menanggulangi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

- 5) Pemberdayaan sumber daya manusia yang religius dan beretos kerja tinggi untuk penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Penguatan kehidupan sosial politik lokal yang kondusif untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- 7) Penguatan kelembagaan sosial politik lokal yang kondusif untuk mendukung stabilitas keamanan dan politik yang semakin tinggi.

c. Isu Strategis Kelompok Kelemahan-Peluang, adalah:

- 1) Meniadakan hambatan investasi bidang agro industri untuk memenuhi permintaan produk agro industri di pasar internasional.
- 2) Menanggulangi hambatan pembangunan sarana prasarana pengembangan wisata daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata bahari.
- 3) Mereduksi konflik sosial untuk penyaluran aspirasi politik.
- 4) Penanggulangan hambatan pemberdayaan kelembagaan untuk pengembangan potensi kerjasama pembangunan antar wilayah.
- 5) Penanggulangan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.
- 6) Pengurangan kesenjangan persebaran sarana prasarana pendidikan dan kesehatan didukung regulasi peningkatan kualitas pelayanan.

d. Isu Strategis Kelompok Kelemahan-Tantangan, adalah:

- 1) Penanggulangan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan untuk mengatasi batasan *ecolabelling* dalam perdagangan bebas.
- 2) Penanggulangan hambatan pembangunan sarana prasarana wisata daerah untuk mengatasi kompetisi regional dalam pengembangan wisata bahari.
- 3) Penanggulangan hambatan optimalisasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk mereduksi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- 4) Mereduksi kecenderungan perbedaan yang mengarah pada konflik sosial untuk mengatasi tantangan stabilitas keamanan dan politik yang semakin tinggi.
- 5) Pengurangan kesenjangan persebaran sarana prasarana kesehatan dan pendidikan untuk mengatasi hambatan dalam mengatasi tingginya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

A. VISI

Visi Kabupaten Jepara yang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap *stakeholders* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut: **"JEPARA RELIGIUS, MAJU, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERDAYA SAING"**.

Dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang substansi visi Kabupaten Jepara maka diperlukan adanya penjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut sebagai berikut :

Religius. Menunjukkan kehidupan masyarakat senantiasa dilandasi oleh penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dimanifestasikan dalam bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Religiusitas sangat berpengaruh pada pembentukan kualitas budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial pada umumnya dan berpemerintahan pada khususnya. Kekuatan nilai-nilai keagamaan (keimanan dan ketaqwaan) yang dimiliki masyarakat akan memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaksanaan kehidupan yang baik. Semua kegiatan yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan ibadah yang akan mendatangkan kebaikan bagi segenap masyarakat. Kondisi hubungan inter dan antar umat beragama yang harmonis juga mendukung terciptanya ketenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Demikian pula kondisi hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Ketenangan dan ketentraman ini sangat membantu dalam penciptaan daerah yang jauh dari pertentangan dan kerusuhan yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur religius adalah peningkatan kualitas hubungan antar umat beragama, jumlah organisasi keagamaan, penurunan gangguan kriminalitas.

Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Perwujudan kemajuan masyarakat tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

kemajuan daerah adalah peningkatan kemandirian daerah, kepuasan masyarakat, kemampuan masyarakat, kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta kualitas lingkungan hidup.

Damai. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam lingkungan tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan menuju tata kehidupan yang aman, tenang, sentosa, tidak ada kerusuhan dan pertentangan. Perwujudan dari kondisi tersebut berkaitan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), keadilan, ketertiban, keamanan dan ketaatan terhadap hukum serta kepatuhan pada nilai-nilai kemasyarakatan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kedamaian daerah adalah penurunan gangguan kriminalitas dan pelanggaran Perda, penurunan kasus KKN.

Sejahtera. Menunjukkan kemakmuran dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik secara ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*). Masyarakat sejahtera adalah yang berilmu, sehat dan terpenuhi kebutuhan ekonominya dengan memadai. Kekayaan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi harus beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dari sisi sosial; terutama melalui penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan kesenjangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah.

Demokratis. Artinya kedaulatan ada di tangan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang bebas dan persaingan partai politik berjalan secara wajar, pemberian peluang bagi semua warga negara untuk menduduki jabatan politik, pemberian kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk berkumpul dan berbicara, bebas menulis dan menyiarkan berbagai informasi sepanjang tidak menghina, memfitnah dan mengadu domba masyarakat, pemberian penilaian atas apa yang telah dan hendak dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi juga diwujudkan dalam bentuk pengakuan atas hak-hak dasar manusia dan kehidupan dimana rakyat bebas dari rasa takut. Demokratisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik ataupun dalam berbagai aspek pembangunan yang lain. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi yang demokratis adalah peningkatan jumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan partisipasi politik. Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang demokratisasi lokal adalah masih adanya kecenderungan perbedaan yang mengarah pada terciptanya

konflik sosial. Disamping itu masih belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

Berdaya Saing. Artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada kompetisi ditingkat lokal, regional, nasional dan Internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai kota Industri yang telah melakukan transaksi ekonomi baik lokal maupun Internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung dengan banyaknya penduduk (masyarakat industri) yang bermata pencaharian pada sektor industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan, dan dukungan sumber daya energi serta sumber daya lainnya. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur daya saing daerah adalah peningkatan: nilai investasi dan nilai ekspor.

B. MISI

Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap *stakeholders*, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, berilmu (cerdas), dan sehat;
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi;
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal;
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

C. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arah pembangunan daerah Kabupaten Jepara tahun 2005-2025 dikelompokkan menurut fungsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah.

1. MISI 1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, BERILMU (CERDAS), DAN SEHAT.

a. Agama

Peranan yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pembangunan keagamaan adalah fasilitasi penyelenggaraan kehidupan beragama pada masyarakat. Oleh karena itu pembangunan agama diarahkan pada fasilitasi: peningkatan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral kehidupan masyarakat yang religius; pengembangan aktivitas keagamaan; pengembangan situasi yang kondusif bagi terwujudnya kehidupan toleransi antar dan intern umat beragama; dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana ibadah.

b. Pendidikan

Permasalahan pendidikan yang dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar, dan tingginya angka putus sekolah. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (formal dan non formal) sejak tingkat pendidikan usia dini sampai pada tingkat pendidikan menengah yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan manajemen dan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, serta pengembangan budaya baca dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

c. Kesehatan

Permasalahan pokok kesehatan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. Oleh karena itu pembangunan dan pelayanan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan untuk semua golongan masyarakat melalui berbagai langkah promotif, kuratif dan rehabilitatif serta mewujudkan perilaku dan lingkungan yang sehat yang didukung oleh jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi

dan profesional, tercukupinya sarana prasarana kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan serta pengembangan dan pemerataan layanan kesehatan yang berstandar prima.

d. Kependudukan

Pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang diikuti dengan tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera merupakan persoalan yang penting dalam kaitan untuk mewujudkan kualitas sumber daya yang relegius, berilmu (cerdas), dan sehat. Oleh karena itu pembangunan kependudukan diarahkan pada upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar mencapai kurang dari 1% dan penanggulangan masalah kemiskinan yang didukung dengan pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu.

e. Keluarga Berencana

Semakin menurunnya persentase cakupan peserta KB aktif dan jumlah capaian peserta KB MKJP, dikhawatirkan akan meningkatkan angka fertilitas yang pada akhirnya menyebabkan kurang terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu pembangunan Keluarga Berencana diarahkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga sejahtera melalui penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, penanggulangan narkoba, PMS serta pengembangan peran serta masyarakat guna mewujudkan KB mandiri.

f. Kepemudaan dan Olah Raga

Problem utama bidang kepemudaan dan olah raga adalah terbatasnya jumlah kelembagaan dan aktivitas kepemudaan dan terbatasnya sarana dan prasarana, pembinaan dan kegiatan (*event*) olah raga mengakibatkan terbatasnya aktivitas pemuda dalam mengekspresikan bakat, minat dan kemampuannya dalam menggapai prestasi. Oleh karena itu arah pembangunan kepemudaan adalah mengupayakan terwujudnya sikap dan perilaku pemuda yang relegius, cerdas, dan sehat serta memiliki sikap kepeloporan, kewirausahaan dan kejuangan untuk membangun daerah disertai dengan pengembangan sinkronisasi kebijakan bidang kepemudaan. Sedangkan pembangunan olah raga diarahkan untuk mengembangkan budaya olah raga bagi masyarakat melalui fasilitasi kebijakan dan manajemen pembinaan olah raga serta penyediaan sarana prasarana olah raga guna mewujudkan masyarakat yang sehat maupun pengembangan olah raga prestasi.

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa perempuan merupakan sub-ordinasi laki-laki, menunjukkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat memandang arti penting kesetaraan gender. Oleh karena itu pembangunan dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan kesetaraan/keadilan gender serta peningkatan peran serta perempuan dalam seluruh aspek kehidupan tanpa meninggalkan fungsi kodrat perempuan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan kelinibagaan pengarusutaman gender dan anak. Sedangkan pembangunan perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan kondisi yang menjamin hak dan tumbuh kembang anak secara optimal.

h. Perlindungan sosial

Masih tingginya angka PMKS merupakan salah satu fenomena kelemahan pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsi penanggulangan masalah sosial. Oleh karena itu pembangunan perlindungan sosial diarahkan pada upaya untuk: Pencegahan, penanggulangan dan pengurangan PMKS melalui upaya pemberdayaan PMKS secara terpadu dan berkelanjutan; Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, anak terlantar dan eks penyandang penyakit sosial; dan Peningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam ikut menanggulangi masalah PMKS.

2. MISI 2: PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN DAERAH BERBASIS PADA INDUSTRI PERTANIAN DAN PARIWISATA, DIDUKUNG DENGAN SEKTOR LAIN YANG BERDAYASAING TINGGI

a. Ekonomi Makro

Walaupun pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk mengalami peningkatan, namun masih banyak penduduk yang masuk kategori Pra Sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa fondasi perekonomian daerah belum sepenuhnya kokoh karena masih besarnya rasio kesenjangan pendapatan antar penduduk dan antar wilayah. Oleh karena itu pembangunan makro ekonomi daerah diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah yang kokoh dimana industri, pertanian dan pariwisata merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat; pengembangan

pembangunan kawasan secara terpadu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan wilayah; dan pengembangan iklim kondusif bagi investasi.

b. Keuangan Daerah

Permasalahan pokok berkaitan dengan keuangan daerah adalah masih kecilnya rasio kemandirian keuangan daerah yang hanya mencapai rata-rata sebesar 14,5% dari seluruh pendapatan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran sebagian besar anggaran masih digunakan untuk mencukupi kebutuhan rutin. Oleh karena itu pembangunan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah (*fiscal capacity*) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial; peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*); dan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

c. Perdagangan

Nilai perdagangan terutama ekspor cenderung mengalami peningkatan, namun pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian daerah dirasakan belum cukup signifikan. Meningkatnya perolehan hasil perdagangan tersebut masih rentan dipengaruhi oleh fluktuasi perubahan nilai mata uang. Oleh karena itu pembangunan perdagangan diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya, kerjasama dan sarana prasarana perdagangan secara terpadu dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi era perdagangan bebas dengan tetap mengedepankan upaya perlindungan konsumen. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada level ibu kota kecamatan, yang dipusatkan di ibu kota kabupaten (Kecamatan Jepara, bagian dari SWP 1), di Keling untuk SWP 5 dan di SWP 6 yang meliputi 2 kecamatan yaitu Mayong dan Nalumsari.

d. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rendahnya struktur permodalan, daya inovasi dan kreatifitas serta etos kerja dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi, peluang pasar serta kurangnya kemitraan antar koperasi dan UKM merupakan masalah pokok pembangunan pada fungsi ini sehingga belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi

daerah. Oleh karena itu pembangunan koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan koperasi dan UKM sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan yang menerapkan sistem pengelolaan usaha secara efisien, produktif, dan berdaya saing, mandiri dan mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil menengah.

e. Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya lapangan kerja dan masih tingginya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja serta membangun jiwa kewirausahaan. Sejalan dengan pengembangan bidang tenaga kerja, diarahkan pula untuk dilakukan pengembangan transmigrasi, baik lokal maupun regional.

f. Pertanian dan Peternakan

Secara ekonomis, peranan pertanian dalam arti luas menunjukkan kecenderungan penurunan angka produksi. Oleh karena itu pembangunan pertanian dan peternakan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya revitalisasi dan peningkatan produksi usaha pertanian dan peternakan dengan memberikan fasilitasi dan mengembangkan kebijakan subsidi input, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan teknologi, pemberdayaan penyuluh dan lembaga masyarakat serta fasilitasi dukungan pemasaran hasil produksi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi daya saing dan peningkatan posisi tawar, pengembangan pertanian organik didukung dengan terjaminnya penyediaan saprodi dan alsintan serta tersedianya sarana-sarana pengolah mutu pasca panen. Pembangunan pertanian dan peternakan dilaksanakan merata disemua SWP di Kabupaten Jepara.

g. Kehutanan dan Perkebunan

Kerusakan hutan dan berkurangnya produktivitas kehutanan dan perkebunan merupakan persoalan yang disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan yang kurang diimbangi dengan upaya konservasi lingkungan. Oleh karena itu pembangunan kehutanan dan perkebunan diarahkan pada upaya rehabilitasi peran dan

fungsi hutan dan lahan perkebunan melalui upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pengembangan kawasan hutan industri serta pengembangan partisipasi dan pemberdayaan segenap pelaku kehutanan dan perkebunan. Pembangunan kehutanan dan perkebunan hampir merata meliputi semua SWP di Kabupaten Jepara.

h. Perikanan dan Kelautan

Kondisi perikanan dan kelautan yang masih dipengaruhi oleh oleh *overfishing* yang cukup tinggi dan menurunnya kualitas lingkungan laut. Oleh karena itu pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan, menjaga terpeliharanya kualitas lingkungan kawasan laut/pantai dan sumber daya perikanan serta mengembangkan penguasaan teknologi budidaya perikanan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan nelayan. SWP yang diarahkan sebagai lokasi pengembangan perikanan dan kelautan adalah: 1) SWP 1, meliputi semua kecamatan yaitu Jepara, Tahunan, Kedung, Bateallt. 2) SWP 2, meliputi 2 kecamatan yaitu Bangsri dan Mlonggo. 3) SWP 4 di Kecamatan Karimunjawa. 4) SWP 5 di Kecamatan Keling.

i. Pengairan

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pengairan adalah berkurangnya sumber air pada musim kemarau akibat penggundulan hutan sehingga daya serap di daerah tangkapan air berkurang dan menurunnya fungsi bendung, serta kualitas saluran bangunan air lainnya. Oleh karena itu pembangunan pengairan diarahkan untuk menjamin daya dukung sumber air dan sarana prasarannya bagi penyediaan air secara lestari dan berkelanjutan melalui penanganan sumber daya air secara terpadu lintas wilayah administratif. Secara khusus, sektor pengairan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, dan sumberdaya air lainnya; dan pengembangan pengendalian banjir.

j. Perindustrian

Masih rendahnya kualitas beberapa jenis produk dibanding produk sejenis di luar negeri merupakan bukti bahwa kualitas manajemen usaha industri masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu pembangunan industri diarahkan untuk menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan

pengadaan bahan baku maupun substitusinya, pengembangan manajemen usaha yang kompetitif dan peningkatan kemampuan teknologi Industri, serta pengembangan sentra-sentra industri potensial. Pengembangan industri akan diarahkan pada sub wilayah pembangunan: 1) SWP 1 meliputi 4 wilayah kecamatan, yaitu Jepara, Tahunan, Kedung, Batealit untuk industri mebel dan ukir. 2) SWP 2, di Kecamatan Mlonggo untuk industri ukir. 3) SWP 3 meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Pecangaan untuk industri tenun, Kalinyamatan untuk industri monel, dan Welahan untuk industri rotan. 4) SWP 6 meliputi 2 wilayah kecamatan, yaitu Mayong dan Nalumsari untuk Industri keramik.

k. Transportasi dan Telekomunikasi

Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan darat, laut, udara dan telekomunikasi merupakan masalah pokok dalam fungsi ini. Oleh karena itu, pembangunan transportasi diarahkan pada: peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang efektif dan efisien sesuai dengan hierarki dan fungsi jalan; pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, laut dan udara yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Sedangkan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk memperluas jaringan dan kualitas telekomunikasi daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pembangunan. Pembangunan transportasi, khususnya perhubungan laut akan diarahkan pengembangannya di 2 lokasi yaitu: 1) SWP 1, di Kecamatan Jepara, dan 2) SWP 4, di Kecamatan Karimunjawa.

l. Pariwisata dan Budaya

Belum optimalnya perkembangannya obyek wisata yang dikelola menyebabkan pariwisata belum mampu memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan manajemen, obyek, pemasaran, destinasi, kemitraan, sarana dan prasarana wisata secara terpadu dalam rangka menarik minat wisatawan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pengembangan perekonomian daerah. Sedangkan pembangunan budaya diarahkan untuk memperkuat, mengembangkan dan melestarikan kesenian, kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jepara. Pembangunan pariwisata akan dikembangkan di beberapa lokasi SWP, yaitu: 1) SWP 1, meliputi 4 kecamatan yaitu Jepara,

Tahunan, Kedung, dan Batealit untuk wisata budaya dan alam. 2) SWP 2, di Kecamatan Bangsri untuk wisata alam. 3) SWP 4, di Kecamatan Karimunjawa untuk wisata budaya dan alam. 4) SWP 5, di Kecamatan Keling untuk wisata budaya dan alam. 5) SWP 6, meliputi 2 kecamatan yaitu Mayong dan Nalumsari untuk wisata budaya.

3. MISI 3: PENGEMBANGAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DIDUKUNG DENGAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pemerintahan Umum

Permasalahan pokok berkaitan dengan fungsi pemerintahan adalah bagaimana mempertahankan momentum reformasi pemerintahan dan memajukan penyelenggaraan otonomi daerah baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat desa sehingga mampu bergerak maju perwujudan *good governance*. Oleh karena itu pembangunan pemerintahan umum diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga mampu mendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sejak dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, dan akuntabilitas kinerja pembangunan.

b. Aparatur dan Kelembagaan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur serta belum terpadunya tugas pokok dan fungsi institusi daerah dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat merupakan penyebab utama rendahnya kinerja aparatur pemerintah. Oleh karena itu pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang disiplin, profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Sedangkan

pembangunan kelembagaan diarahkan untuk mengembangkan institusi pemerintahan baik unsur eksekutif maupun legislatif agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh lembaga yang efektif dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan dan mengembangkan jejaring kerjasama antar daerah.

c. Perpustakaan, Data, Informasi dan Komunikasi

Permasalahan perpustakaan, data, informasi dan komunikasi adalah belum berkembangnya perpustakaan daerah, kurangnya kepedulian dan pemahaman pentingnya arsip, masih terbatasnya aplikasi sistem informasi dan komunikasi pada satuan kerja. Oleh karena itu, pembangunan perpustakaan, data, informasi infrastruktur pemerintahan diarahkan pada: peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang terpadu sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dengan mewujudkan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan didukung oleh kemampuan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan pembangunan data, informasi dan komunikasi diarahkan pada terwujudnya fungsi komunikasi dan media massa secara optimal dan terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi pembangunan, peningkatan peranan jaringan komunikasi yang memadai guna mengembangkan demokratisasi serta melaksanakan komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menumbuhkan motivasi pembangunan secara kebersamaan.

d. Pengawasan

Meningkatnya jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian pada negara yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan. Pembangunan pengawasan diarahkan pada upaya sistem dan prosedur pengawasan, peningkatan profesionalisme aparatur pengawas sehingga mampu mencegah praktek-praktek KKN dan penyimpangan dan atau penyalahgunaan kewenangan melalui pengembangan responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas aparatur dan lembaga sektor publik.

e. Pelayanan Publik

Belum optimalnya kinerja pelayanan publik dapat dibuktikan dari masih banyaknya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Oleh karena itu pembangunan

pelayanan publik diarahkan untuk peningkatan peran dan fungsi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam kerangka pemberian insentif. Upaya tersebut ditempuh melalui: Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; Mengembangkan infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem Informasi manajemen daerah melalui infrastruktur teknologi informasi yang handal; dan Mewujudkan ruang partisipasi publik bagi masyarakat dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik.

4. MISI 4: PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN KAWASAN (WILAYAH) BERBASIS PADA KEMAMPUAN DAN POTENSI LOKAL

a. Penyehatan Lingkungan

Rendahnya cakupan pelayanan persampahan dan bertambahnya volume sampah non organik yang sulit didaur ulang serta belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan merupakan masalah utama pengelolaan sampah. Oleh karena itu pembangunan kebersihan diarahkan pada pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan yang terpadu dan ramah lingkungan guna menjamin daya dukung pembangunan yang berkelanjutan.

b. Perumahan dan Permukiman

Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan makin tinggi pula kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang mencukupi. Namun dengan keterbatasan kemampuan masyarakat, masih banyak didapati perumahan dan lingkungan permukiman yang belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada terpenuhinya jumlah kebutuhan rumah dan sarana lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni serta terjangkau oleh kemampuan masyarakat dengan mengembangkan usaha fasilitasi pemberdayaan komunitas perumahan. Pembangunan perumahan dan

pemukiman diarahkan pada lokasi-lokasi ibu kota kecamatan pada setiap SWP yang ada di Kabupaten Jepara.

c. Air Bersih

Permasalahan pokok air bersih adalah masih banyak penduduk atau rumah tangga yang belum mendapatkan air bersih. Oleh karena itu pembangunan air bersih diarahkan untuk pengelolaan sumber-sumber air yang lestari dan berkelanjutan dan peningkatan jangkauan penyaluran dan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

d. Pertamanan dan Penerangan Jalan

Permasalahan pertamanan adalah keterbatasan jumlah ruang terbuka di perkotaan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun perawatan taman. Oleh karena itu pembangunan pertamanan diarahkan pada terpenuhinya rasio luas taman dan ruang publik terbuka dengan area terbangun serta pengembangan dekorasi kota yang mempertimbangkan aspek estetika kota sebagai wujud karakter dan ciri wilayah Kabupaten Jepara. Sedangkan permasalahan penerangan jalan umum adalah terbatasnya jumlah sambungan penerangan yang berakibat meningkatnya sambungan liar lampu penerangan jalan oleh masyarakat. Oleh karena itu pembangunan penerangan jalan umum diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum secara merata, terutama pada kawasan perumahan dan permukiman serta pusat-pusat aktivitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan.

5. MISI 5: PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DALAM RANGKA Mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif

a. Politik Lokal

Permasalahan politik lokal adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dan meningkatnya potensi konflik sosial. Oleh karena itu pembangunan politik lokal diarahkan untuk mengembangkan budaya politik yang santun dalam kerangka menjaga momentum demokratisasi, Pengembangan wawasan kebangsaan, penguatan peran dan fungsi infrastruktur maupun suprastruktur politik, penguatan pola seleksi dan pergantian kepemimpinan politik lokal secara regulatif, serta peningkatan

kесerasian hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Ketertiban dan Keamanan

Permasalahan ketertiban dan keamanan adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum serta terjadinya tindak gangguan kriminalitas. Oleh karena itu pembangunan ketertiban dan keamanan diarahkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif untuk mencegah munculnya gangguan yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial maupun bencana yang melibatkan partisipasi aktif segenap komponen masyarakat.

c. Pembinaan Hukum

Banyaknya perubahan peraturan di tingkat pusat menyebabkan kegamangan daerah dalam menterjemahkan dan menerapkan peraturan dan produk hukum daerah yang sesuai dengan dinamika masyarakat serta penegakan hukum yang belum konsisten. Oleh karena itu pembangunan pembinaan hukum diarahkan untuk membangun tata peraturan perundang-undangan daerah sesuai prinsip-prinsip *good government*, mewujudkan pemahaman dan persamaan persepsi serta kesadaran hukum dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta mendorong penegakan dan ketaatan terhadap hukum.

6. MISI 6: PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DIDUKUNG DENGAN PENGELOLAAN TATA RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKESINAMBUNGAN

a. Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok pengembangan lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang konsistennya penegakan hukum. Oleh karena itu pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam maupun rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam sehingga terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi lingkungan (laut, pantai, pesisir, daratan, hutan, dan sebagainya) secara berkelanjutan.

b. Tata Ruang dan Pertanahan

Permasalahan umum tata ruang adalah peningkatan perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi non pertanian dan tidak konsistennya antara perencanaan tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan. Permasalahan pertanahan adalah masih banyaknya petak tanah yang belum bersertifikat. Oleh karena itu pembangunan tata ruang dan pertanahan diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi penataan ruang sesuai dengan peruntukkannya sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang dimiliki, termasuk aspek pengendaliannya. Pengembangan dimensi keruangan diarahkan pula bagi penciptaan pengembangan wilayah strategis sehingga mampu mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Pembangunan kewilayahan menurut Sub Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut: 1) SWP 1, meliputi wilayah Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung dan Batealit dengan pusat pengembangan di kota Jepara. SWP 1 dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri kerajinan ukir, pemukiman serta perikanan, 2) SWP II, meliputi wilayah Kecamatan Bangsri, Kembang, Mlonggo dengan pusat pengembangannya di kota Bangsri. SWP II dikembangkan sebagai wilayah pertanian tanaman pangan peternakan, hutan lindung, resapan air dan pemukiman, 3) SWP III, meliputi wilayah Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan dan Welahan dengan pusat pengembangan di kota Pecangaan. SWP III dikembangkan sebagai kawasan pertanian, pemukiman, kerajinan monel dan rotan serta industri tenun troso, 4) SWP IV, meliputi wilayah Kecamatan Keling, dengan pusat pengembangan kota Keling. SWP IV dikembangkan sebagai pusat pengembangan pertanian pemukiman dan suaka cagar alam Benteng Portugis, 5) SWP V, meliputi wilayah Kecamatan Mayong dan Nalumsari dengan pusat pengembangan di kota Mayong. SWP V dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, pemukiman, kerajinan keramik, dan bordir, dan 6) SWP VI, meliputi wilayah Kecamatan Karimunjawa dengan pusat pengembangan kota Karimunjawa. SWP VI sebagai pusat pengembangan kawasan pariwisata, suaka alam dan cagar budaya dan perikanan.

c. Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi

Permasalahan pertambangan dan energi adalah adanya penambangan liar yang tidak mengindahkan konservasi lingkungan hidup. Oleh karena itu pembangunan pertambangan diarahkan untuk mewujudkan tertib penambangan baik meliputi perijinan, eksplorasi dan eksploitasi bahan

tambang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan pembangunan energi khususnya listrik diarahkan pada perluasan jangkauan jaringan listrik PLN di kawasan terpencil dan lingkungan industri dan pengembangan energi alternatif. Pembangunan sumber daya alam, pertambangan dan energi akan diarahkan di beberapa lokasi, seperti: 1) SWP 2, di Kecamatan Mlonggo untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. 2) SWP 4, di Kecamatan Karimunjawa, dan SWP lain yang memiliki potensi bahan tambang galian golongan C.

BAB IV

TAHAPAN DAN SIKLUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka memberikan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk operasionalisasi arah pembangunan daerah secara lebih sistematis, terencana dan berkesinambungan, maka dirumuskan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan, yang akan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tahapan dan prioritas pembangunan dirumuskan dengan mengkaitkan antara misi pembangunan jangka panjang daerah dengan arah pembangunan daerah sehingga menjadi skala prioritas pembangunan daerah untuk setiap tahapan pembangunan berdimensi lima tahunan.

1. TAHAPAN PERTAMA (2005-2009)

Berdasarkan pada kinerja pelaksanaan pembangunan tahapan lima tahun sebelumnya, maka pada tahapan lima tahun pertama (2005-2009) dalam kerangka pembangunan jangka panjang ini diarahkan untuk melanjutkan derap langkah pembangunan yang sudah senafas dengan tuntutan peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan di segala bidang. Tahapan lima tahun pertama akan lebih difokuskan pada penataan dan pembangunan sistem, regulasi, kebijakan dan peraturan sebagai basis bagi pembangunan tahapan lima tahun berikutnya.

Misi pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius berilmu (cerdas), dan sehat, akan diupayakan melalui pembangunan multi sektor yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Jepara, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menangani bidang pendidikan (tenaga pendidik dan non pendidik).

Beberapa bidang lain yang memiliki arah yang sama dalam pembangunan sumber daya manusia juga akan turut diupayakan peningkatannya, dengan target antara lain meningkatnya kualitas pelayanan dasar yang berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia (berilmu, sehat, berdaya beli), menurunnya bias gender, meningkatnya etos kerja, meningkatnya etika dan moralitas, meningkatnya kelmanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan

teknologi, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, remaja, dan wanita, meningkatnya kinerja pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya penanganan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi Kabupaten Jepara.

Misi kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi akan diupayakan pencapaiannya pada tahapan lima tahun pertama dengan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan iklim kondusif dalam berusaha yang akan berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi makro daerah dan penguatan kapasitas keuangan daerah.

Lima tahun pertama pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin menunjukkan pergeseran dalam sektor basis ekonomi daerah, industri-pertanian (agro industri) akan semakin meningkat peranannya dalam perekonomian daerah, disamping tepat eksisnya industri pengolahan sebagai *icon* Kabupaten Jepara. Upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, berbasis pada budaya bahari dan pesisir akan semakin relevan. Kondisi pertumbuhan perekonomian Jepara yang semakin baik diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara yang akan ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Misi ketiga yaitu pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik; pada tahapan lima tahun pertama akan ditekankan pada peningkatan komitmen dan tindakan pengurangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik.

Kondisi demikian bisa tercipta dengan prasyarat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara umum, baik pada aspek kewenangan, kelembagaan, aparatur, keuangan, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya. Muara dari upaya pemberantasan KKN adalah terciptanya kinerja pelayanan publik yang semakin prima, konsistensi regulasi daerah-pusat, dan tegaknya hukum, yang kesemuanya mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Misi keempat yaitu peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal yang akan diprioritaskan pada peningkatan dan pemeliharaan (rehabilitasi) sarana dan prasarana wilayah (terutama di kawasan pedesaan, kawasan Kepulauan Karimunjawa), misalnya kebersihan, transportasi, kelistrikan, telekomunikasi,

perumahan, air bersih, pertamanan, penerangan jalan, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan desa-kota, bahkan mampu untuk membangun embrio bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kewilayahan harus menjadi prioritas daerah dan mendapat dukungan atau peran serta swasta, yang hanya bisa terwujud apabila disertai dengan langkah-langkah penataan kebijakan keruangan dan kewilayahan yang konsisten dan terpadu.

Misi kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif yang akan diprioritaskan pada langkah-langkah pemantapan situasi dan kondisi politik lokal yang kondusif, penguatan ketertiban dan keamanan daerah, dan tegaknya supremasi hukum untuk menopang (menjadi basis) kelancaran pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

Kabupaten Jepara yang tertib, aman dan damai ditandai dengan menurunnya tingkat kerawanan daerah, menurunnya tingkat konflik, menurunnya Indeks kriminalitas, meningkatnya demokratisasi lokal, yang pada akhirnya akan berdampak pada kepatuhan pada hukum sehingga persatuan dan kesatuan tetap dapat terjaga dengan baik.

Misi keenam yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan; yang akan ditekankan pada langkah-langkah pemantapan dalam perencanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dan lingkungan hidup

Dengan adanya pemantapan dalam aspek perencanaan, regulasi, dan kebijakan tentang keruangan dan lingkungan hidup maka diharapkan akan membawa efek pada semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan menurun, peningkatan konsistensi peruntukan lahan, peningkatan kesadaran lingkungan hidup, ketepatan penanganan penambangan.

2. TAHAPAN KEDUA (2010-2014)

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan dan hasil pembangunan tahapan lima tahun pertama, maka perlu kiranya dilakukan langkah-langkah untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Jepara di segala bidang.

Misi pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius berilmu (cerdas), dan sehat yang pada tahapan lima tahunan kedua difokuskan pada optimalisasi (bila perlu maksimalisasi) upaya pemerataan memperoleh

pendidikan sampai jenjang SMA/Sederajat bagi penduduk Kabupaten Jepara. Langkah ini harus disertai dengan meningkatnya komitmen tiga pilar pendidikan – pemerintah, sekolah dan masyarakat – untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya melalui penyediaan biaya pendidikan (beasiswa, BOS, dan lain-lain), penyediaan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Perbaikan pendidikan hanyalah salah satu dari sekian banyak target yang harus dicapai dalam pembangunan sumber daya manusia kabupaten Jepara pada tahapan pembangunan lima tahunan kedua. Capaian lain yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat (pendapatan per kapita naik; angka kemiskinan turun; tingkat pengangguran turun), peningkatan derajat kesehatan (usia harapan hidup naik; status gizi naik), peningkatan kesejahteraan anak, remaja dan wanita (kesetaraan gender naik; perlindungan anak naik; laju pertumbuhan penduduk terkendali; kesenjangan kesejahteraan turun), dan peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Misi kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi. Setelah pada tahapan pertama difokuskan untuk mengembangkan prasarana dan sarana ekonomi, maka pada tahapan pembangunan lima tahunan kedua diprioritaskan pada penanganan yang lebih konkrit dan optimal terhadap pembangunan dan pengembangan sektor basis Jepara (industri, pertanian dan pariwisata).

Pengembangan sektor basis akan bermuara pada dimilikinya daya saing yang tinggi pada tingkat nasional dan Internasional dari produk-produk unggulan dan andalan Kabupaten Jepara, yang berasal dari sektor industri, pertanian, pariwisata atau perpaduannya. Daya saing akan dapat meningkat bila didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan dimanfaatkannya teknologi produksi yang tepat guna sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang tinggi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal sehingga mampu berperilaku dan berkinerja global, pengembangan jaringan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang memadai.

Misi ketiga yaitu pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Harapan masyarakat akan ditegakkannya pemberantasan KKN dalam lingkungan birokrasi semakin kuat, diharapkan pada pembangunan lima tahunan pertama fokus ini sudah mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Selanjutnya akan diikuti dengan langkah

prioritas kedua, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang handal untuk memenuhi tuntutan birokrasi masa depan, didukung dengan disediakannya berbagai prasarana dan sarana pelaksanaan tugas/pekerjaan yang memadai.

Pada saat aparatur dan prasarana serta sarana telah dipandang memadai maka pemerintah (birokrasi) seyogianya mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, misalnya dalam penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas, lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, didukung dengan adanya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah, bahkan bila perlu diperkuat dengan kontrak pelayanan (citizen's charter) dan pelayanan yang bersertifikat ISO.

Misi keempat yaitu peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal. Pelaksanaan misi keempat ini, untuk tahapan lima tahun kedua diprioritaskan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan kawasan, misalnya prasarana dan sarana transportasi, perdagangan, telekomunikasi, air bersih, kelistrikan, penerangan jalan, dan sebagainya.

Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan misi ini adalah akan ditekankannya peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dan sehat, dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya yang memadai. Jumlah penduduk akan terus meningkat maka harus disertai dengan penyediaan fasilitas perumahan dan permukiman.

Misi kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif. Pada tahapan pembangunan lima tahunan kedua diprediksi akan semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), karena kurang beruntung dalam persaingan diberbagai bidang yang semakin ketat/keras. Fenomena ini menjadi prioritas penanganan pada tahapan ini.

Pada sisi lain, kondisi kamtibmas Kabupaten Jepara semakin kondusif, didukung dengan komitmen segenap pemangku kepentingan dan profesionalitas aparatur penegak hukum daerah. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum daerah. Sejalan dengan itu, kehidupan demokratisasi lokal semakin terwujud ditandai kuatnya peran masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga kemasyarakatan.

Misi keenam yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan, akan dilaksanakan dengan prioritas pada penanganan aktivitas terkait dengan lingkungan hidup dan tata ruang. Langkah ini perlu dioptimalkan setelah pada tahap pertama ditekankan pada aspek perencanaan dan perumusan kebijakan, dan regulasi tata ruang dan lingkungan hidup.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan pada sisi pertambangan dan energi akan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan.

3. TAHAPAN KETIGA (2015-2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan lima tahunan tahapan pertama dan kedua, maka tahapan ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Misi pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, berilmu (cerdas), dan sehat, yang akan diprioritaskan pada pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sejalan dengan hal di atas tetap secara simultan dilakukan pembangunan pendidikan dalam aspek, kebijakan, program lainnya, seperti yang telah dilaksanakan secara rutin, seperti: pembiayaan pendidikan, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, peningkatan relevansi pendidikan, dan sebagainya.

Pada aspek di luar pendidikan, sumber daya manusia juga akan ditingkatkan hingga tercapai indikator sebagai berikut semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; semakin meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan

anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; mantapnya budaya lokal; dan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Misi kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi; misi ini akan dilaksanakan dengan prioritas pada pembangunan perekonomian masyarakat yang ditekankan pada fasilitasi permodalan dan teknologi tepat guna, khususnya untuk aktivitas ekonomi pada sektor basis di atas, atau sektor lain yang berdaya saing tinggi.

Peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat dari sisi permodalan dan dukungan teknologi akan berdampak pada peningkatan daya saing yang semakin kuat dan kompetitif diperkuat dengan adanya keterpaduan industri pengolahan dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan.

Misi ketiga yaitu pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, pada tahapan ketiga ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan prima (service excellent) kepada masyarakat.

Langkah ini perlu diprioritaskan mengingat semakin lama peran pemerintah semakin berpusat pada sisi pelayanan publik. Apalagi dengan ditetapkannya standar pelayanan, kontrak pelayanan, e-government, dan sertifikasi ISO, maka pelayanan yang diselenggarakan pemerintah akan semakin penting. Pelayanan yang baik akan memicu masuknya investasi yang diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan daerah.

Misi keempat yaitu peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal. Pada tahapan ketiga diprioritaskan pada peningkatan dan pemeliharaan (rehabilitasi) prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan/wilayah.

terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan potensi unggulan

daerah (berbasis sektor industri, pertanian, dan pariwisata). Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Misi kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif. Sebagai prioritas pelaksanaan misi ini dalam tahapan ketiga adalah pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial; hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pada sisi lain, kondisi aman dan damai semakin mantap, kemampuan kamtibmas makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi dan personil bidang kamtibmas daerah. Kehidupan demokrasi lokal semakin mengakar sejalan sejalan dengan mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur makin mampu mendukung derap langkah pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

Misi keenam yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan. Setelah dilakukan langkah-langkah penanganan yang tegas pada tahapan kedua, maka pada tahapan ketiga ini ditekankan pada aspek kontinuitas atau keberlanjutan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui langkah pengendalian, monitoring, dan evaluasi tata ruang dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan

tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

4. TAHAPAN KEEMPAT (2020-2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pelaksanaan pembangunan lima tahunan tahap pertama hingga ketiga, maka pembangunan tahapan keempat ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang maju, damai, sejahtera, demokratis, religius, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

Misi pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu (cerdas), sehat dan religius, yang diprioritaskan pada tercapainya mutu atau kualitas pendidikan, menjadi salah satu daerah dengan pembangunan bidang pendidikan yang terbaik di Jawa Tengah atau Nasional.

Pembangunan sumber daya manusia sangat dekat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada tahapan ini diharapkan akan dicapai kondisi semakin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatnya kemampuan aplikasi iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang; sumber daya manusia semakin berkarakter, cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek.

Misi kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi; misi ini dilaksanakan dengan prioritas pada pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan jaringan pemasaran dan perdagangan bagi pelaku perekonomian lokal pada lingkup regional, nasional, dan internasional.

Struktur perekonomian Kabupaten Jepara diprediksi akan semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, pariwisata, dan sektor lain yang berdaya saing tinggi, sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik.

Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan iptek yang makin maju; serta berkembangnya usaha dan investasi dari asing dan dalam negeri; pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan; pendapatan per kapita yang semakin baik; tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

Misi ketiga yaitu pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Prioritas pada penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas semakin tampak dalam realita birokrasi, kondisinya sudah melembaga dengan baik.

Kondisi di atas sangat mendukung dalam upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dengan jejaring berskala nasional dan global.

Misi keempat yaitu peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal. Pada tahapan ini semua langkah difokuskan atau diprioritaskan untuk melaksanakan misi keempat; langkah pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kewilayahan/kawasan semakin ditekankan.

Kondisi akhir yang muncul adalah prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan kawasan semakin tersebar secara merata, tingkat perekonomian semakin meningkat, tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat, dan akhirnya tingkat kesenjangan akan semakin menurun.

Misi kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif. Kinerja pembangunan yang semakin baik diberbagai bidang atau sektor tidak mungkin akan tercapai bila tidak didukung oleh kondisi politik, hukum dan

kamtibmas yang mantap dan kondusif. Hal inilah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan misi kelima dalam tahapan pembangunan lima tahunan yang terakhir.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya sistem hukum daerah yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum.

Misi keenam yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan. Pada tahapan inipun ditekankan untuk melakukan langkah-langkah pemantapan pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang.

Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang difengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

MISI	TAHAPAN			
	I (2006-2010)	II (2011-2015)	III (2016-2020)	IV (2021-2025)
1. Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik	Pemerataan pendidikan/beasiswa	Sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan ekonomi masyarakat	Sarana dan prasarana ekonomi	Pengembangan sektor basis	Fasilitas permodalan dan teknologi	Jaringan pemasaran dan perdagangan
3. Tata pemerintahan yang baik	Pemberantasan KKN	SDM aparatur dan sarana prasarana	Peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan
4. Sarana dan prasarana penunjang	Rehab sarana dan prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana	Rehab sarana dan prasarana	Rehab dan pembangunan sarana prasarana
5. Perindungan sosial	Pemantapan politik lokal, ketertiban dan keamanan	Penanganan penyandang masalah sosial	Pembangunan sarana dan prasarana sosial	Pemantapan kondisi, ketertiban dan keamanan
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Pemantapan perencanaan lingkungan hidup dan tata ruang	Penanganan lingkungan hidup dan tata ruang	Pengendalian, monitoring dan evaluasi lingkungan hidup dan tata ruang	Pemantapan pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang